



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH  
BIRO ORGANISASI**

**RENJA  
BIRO ORGANISASI  
TAHUN 2020**

**Tahun 2019**

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Setiap tahunnya Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dirangkum dalam suatu rencana kerja, dan rencana kerja itu sendiri merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 126 ayat (2) dinyatakan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dan selanjutnya pada pasal 139 dinyatakan bahwa Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/12/I/Ren.Makro/Bappeda-2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Rencana Kerja yang disusun berisikan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan sehubungan hal tersebut Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, dengan melalui suatu proses

atau tahapan antara lain Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2020, mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja seperti peraturan perundang-undangan dan panduan atau pedoman teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yang selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan bagian organisasi Kabupaten/kota dalam menyatukan persepsi untuk perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pengolahan data dan informasi untuk dijadikan sesuatu rencana kerja biro organisasi tahun 2020 yang dalam penyusunan mempedomani dokumen perencanaan strategis (renstra).

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.
17. Keputusan Kepala Biro Organisasi Nomor :065-3942-2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
18. Keputusan Kepala Biro Organisasi Nomor :065-119-2019 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2020.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1.Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2020 ini adalah untuk petunjuk arah atau pedoman pelaksanaan tugas pokok Biro Organisasi Biro Organisasi Tahun 2020.

#### **1.3.2.Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2020 ini adalah untuk menetapkan program/kegiatan Biro Organisasi Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2020 ini, disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****BAB V PENUTUP**

## B A B II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

#### PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

##### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2016 – 2021, dan selama tahun 2018 Biro Organisasi telah melaksanakan 45 (empat puluh lima) kegiatan untuk mendukung 10 (sepuluh) program. Capaian Kinerja Program Tahun 2018 sesuai dengan Tabel T-C.29 dapat diuraikan sebagai berikut .:

##### **1 Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan.**

Untuk tahun anggaran 2018 secara umum Biro Organisasi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan namun dari realisasi keuangan kegiatan masih terdapat capaian dibawah 95% tetapi untuk realisasi fisik 100%. Adapun Program/kegiatan yang tidak tercapai tersebut adalah :

##### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu :

##### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 13.420.959,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.637.201,- dengan persentase realisasi keuangan 64,36% namun untuk realisasi fisik 100%. Tidak tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan target kinerja adalah tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya dan gaji keTiga Belas dari Honorarium caraka.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak terpenuhinya target dari pelaksanaan kegiatan ini disebabkan oleh Biro Organisasi hanya melakukan pembayaran terhadap tagihan jasa komunikasi (Telephone), sedangkan untuk tagihan dari pemakaian sumber daya air dan listrik dibebankan kepada anggaran Biro Umum. Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.876.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 668.939,- dengan persentase 17,26% namun untuk realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 36.320.520,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 27.931.520,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 76,90% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam penyediaan alat tulis kantor.

4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 64.167.750,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 54.414.750,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 84,80% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam penyediaan barang cetak dan penggandaan.

5. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dalam dan luar daerah

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 565.734.680,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 529.139.227,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,53% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan biaya tiket dan efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

6. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 12.544.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 9.100.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 72,54% sedangkan untuk realisasi

fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam pemakaian biaya makan minum rapat.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**1. Pengadaan Meubeleur**

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 119.780.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 109.560.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 91,47% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi atau kelebihan biaya pengadaan meubeleur kantor.

**2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 109.936.412,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 60.986.767,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 55,47% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam pemakaian biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas.

**3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 22.400.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 17.705.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 79,04% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan berkurangnya kerusakan computer dan jaringan komputerisasi kantor.

**4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 303.750.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,46% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan anggaran dalam pengadaan kendaraan dinas.

#### 5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 52.386.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 44.100.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 84,18% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan.

#### c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program ini hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 59.759.699,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 39.790.900,- yaitu sebesar 66,58% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini dikarenakan tidak banyaknya undangan untuk peningkatan kompetensi aparatur.

#### d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan pada tahun 2018 yang realisasi keuangannya tidak memenuhi target kinerja yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp. 57.081.750,- dan yang terealisasi Rp. 31.740.000,- yaitu sebesar 55,60%. hal ini disebabkan adanya efisiensi pemakaian anggaran.

#### e. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

Pada program ini dari 7 (tujuh) kegiatan yang ada terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangan tidak mencapai target kinerja yakni :

##### 1. Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 45.576.360,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 42.426.950,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,09% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini

disebabkan adanya kelebihan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan personal record.

2. Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 92.143.400,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 83.716.243,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 90,85% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kelebihan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya kebutuhan lainnya untuk pelaksanaan rakornis.

**f. Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan, namun dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangannya masih dibawah 95%, secara umum disebabkan oleh adanya kelebihan dalam pemakaian anggaran. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se- Sumatera Barat

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 104.348.420,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 94.547.050,- dengan persentase 90,61% namun untuk realisasi fisik 100%.

2. Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 116.219.039,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 106.829.500,- dengan persentase 91,92%. Namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

**g. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**

Pada program ini dari 4 (empat) kegiatan dan 2 (dua) kegiatan yang pencapaian target kinerjanya dibawah 95%,yaitu kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 69.053.335,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 62.068.035,- dengan persentase 89,88%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

2. Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 42.488.250,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 40.121.338,- dengan persentase 94,43%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

**h. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan OPD Provinsi Sumatera Barat**

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, namun dalam pelaksanaan masih ada 3 (tiga) kegiatan dalam pencapaian target kinerja realisasi keuangan dibawah 95%. Hal ini disebabkan adanya kelebihan pemakaian anggaran, kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Monev Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 39.802.200,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 36.802.900,- dengan persentase 92,46%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 81.476.830,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 72.775.600,- dengan persentase 89,32%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

3. Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar

kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 161.762.700,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 150.441.100,- dengan persentase 93,00%. namun untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

**i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pada program ini dari 5 (lima) kegiatan, dan terdapat 4 (empat) kegiatan dalam pelaksanaannya belum mencapai target kinerja realisasi keuangan sebesar 95 %, hal ini secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi pemakaian anggaran. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

1. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten /Kota dengan anggaran tersedia sebesar Rp. 39.112.335,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.066.550,- atau persentase sebesar 84,54% namun pencapaian realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 85.298.558,- dan yang terealisasi sebesar 76.514.070,- atau dengan persentase sebesar 89,70% namun untuk realisasi fisik sebesar 100%.
3. Kegiatan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat, pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 80.462.585,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 70.278.243,- dengan persentase realisasi sebesar 87,34%, namun untuk realisasi fisik sebesar 100%.
4. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota, pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar 112.568.400,- dan yang terealisasi sebesar 103.495.900,- dengan persentase realisasi keuangan 91,94% dan realisasi fisik 100%.

**2. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target yang ditetapkan**

Pada tahun anggaran 2018 program dan kegiatan Biro Organisasi ada yang telah mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Adapun Program/ kegiatan yang telah memenuhi target tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja realisasi keuangan. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp.95.088.337,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 91.600.000,- atau dengan realisasi keuangan sebesar 96,33% dan realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peratalan/Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp.2.350.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.350.000,- atau dengan realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi fisik 100%.

3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

Kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 20.452.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 20.079.000,- atau dengan realisasi keuangan sebesar 98,17% dan realisasi fisik 100%.

**b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang memenuhi target kinerja terdapat yaitu Kegiatan Penatausahaan Keuangan OPD yang pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 146.951.300 dan yang terealisasi sebesar Rp. 145.989.596,- atau dengan persentase realisasi keuangan 99,35% dan persentase realisasi fisik 100%.

**c. Program Manajemen Perubahan**

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 184.500.800,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 181.574.600,- atau dengan realisasi keuangan 98,41% dan realisasi fisik 100%.

**d. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**

Pada Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yang pencapaian target kinerjanya diatas 95% yaitu kegiatan:

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 67.250.188,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 64.898.750,- atau dengan persentase 96,50% dan persentase realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 71.126.270,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 69.189.900,- atau dengan persentase 97,28% dan persentase realisasi fisik 100%.
3. Kegiatan Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 24.960.800,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 24.900.700,- atau dengan persentase 99,76% dan persentase realisasi fisik 100%.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 35.900.400,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 35.425.606,- atau dengan persentase 98,68% dan persentase realisasi fisik 100%.

**e. Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yang realisasi target kinerjanya mencapai target yaitu kegiatan :

1. Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 343.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 337.348.528,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,35% dan realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 120.824.292,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,66% dan realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 138.163.600,- yang terealisasi sebesar Rp. 135.864.450,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,34% dan realisasi fisik 100%.
4. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 108.475.500,- yang terealisasi sebesar Rp. 106.120.850,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,83% dan realisasi fisik 100%.
5. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 511.133.489,- yang terealisasi sebesar Rp. 489.120.903,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,69% dan realisasi fisik 100%.

**f. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi target kinerjanya mencapai target dan adapun kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi SOP pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 112.677.450,- yang terealisasi sebesar Rp. 108.536.450,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,32% dan realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 208.198.412,- yang terealisasi sebesar Rp. 202.387.618,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,21% dan realisasi fisik 100%.

**g. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan OPD Provinsi Sumatera Barat**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi target kinerjanya yang mencapai target dan adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2018

disediakan anggaran sebesar Rp. 238.011.095,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 230.628.700,- atau dengan persentase realisasi keuangan 96,90% dan realisasi fisik 100%.

Untuk lebih jelas hasil realisasi anggaran Biro Organisasi Tahun 2018 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

| NO        | PROGRAM/KEGIATAN                                                | ANGGARAN               | REALISASI              | %              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                       | <b>Rp. 696,063,909</b> | <b>Rp. 629,891,637</b> | <b>90.49 %</b> |
| 1         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | Rp. 13,420,959         | Rp. 8,637,201          | 64.36 %        |
| 2         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik         | Rp. 3,876,000          | Rp. 668,939            | 17.26 %        |
| 3         | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                    | Rp. 36,320,520         | Rp. 27,931,520         | 76.90 %        |
| 4         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                         | Rp. 64,167,750         | Rp. 54,414,750         | 84.80 %        |
| 5         | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah     | Rp. 565,734,680        | Rp. 529,139,227        | 93.53 %        |
| 6         | Penyediaan Makanan dan Minuman                                  | Rp. 12,544,000         | Rp. 9,100,000          | 72.54 %        |
| <b>II</b> | <b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                | <b>Rp. 747,393,249</b> | <b>Rp. 650,130,767</b> | <b>86.99 %</b> |
| 1         | Pengadaan Meubeler                                              | Rp. 119,780,000        | Rp. 109,560,000        | 91.47 %        |
| 2         | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi                   | Rp. 95,088,337         | Rp. 91,600,000         | 96.33 %        |
| 3         | Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional         | Rp. 109,936,412        | Rp. 60,986,767         | 55.47 %        |
| 4         | Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor       | Rp. 2,350,000          | Rp. 2,350,000          | 100.00 %       |
| 5         | Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Rp. 22,400,000         | Rp. 17,705,000         | 79.04 %        |
| 6         | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD               | Rp. 20,452,500         | Rp. 20,079,000         | 98.17 %        |
| 7         | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional                          | Rp. 325,000,000        | Rp. 303,750,000        | 93.46 %        |

|            |                                                                                          |                        |                        |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 8          | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Rp. 52,386,000         | Rp. 44,100,000         | 84.18%        |
| <b>III</b> | <b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                        | <b>Rp. 59,759,699</b>  | <b>Rp. 39,790,900</b>  | <b>66.58%</b> |
| 1          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                               | Rp. 59,759,699         | Rp. 39,790,900         | 66.58%        |
| <b>IV</b>  | <b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>            | <b>Rp. 204,033,050</b> | <b>Rp. 177,729,596</b> | <b>87.11%</b> |
| 1          | Penatausahaan Keuangan SKPD                                                              | Rp. 146,951,300        | Rp. 145,989,596        | 99.35%        |
| 2          | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | Rp. 57,081,750         | Rp. 31,740,000         | 55.60%        |
| <b>V</b>   | <b>PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT</b>       | <b>Rp. 521,052,825</b> | <b>Rp. 490,648,300</b> | <b>94.16%</b> |
| 1          | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                            | Rp. 238,011,095        | Rp. 230,628,700        | 96.90%        |
| 2          | Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar             | Rp. 39,802,200         | Rp. 36,802,900         | 92.46%        |
| 3          | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov Sumatera Barat Tahun 2018 | Rp. 81,476,830         | Rp. 72,775,600         | 89.32%        |
| 4          | Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar                             | Rp. 161,762,700        | Rp. 150,441,100        | 93.00%        |
| <b>VI</b>  | <b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                                                               | <b>Rp. 184,500,800</b> | <b>Rp. 181,574,600</b> | <b>98.41%</b> |
| 1          | Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                       | Rp. 184,500,800        | Rp. 181,574,600        | 98.41%        |
| <b>VII</b> | <b>PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>                                                | <b>Rp. 336,957,418</b> | <b>Rp. 320,558,149</b> | <b>95.13%</b> |

|             |                                                                                    |            |                      |            |                      |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| 1           | Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar                                           | Rp.        | 71,126,270           | Rp.        | 69,189,900           | 97.28%        |
| 2           | Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian                            | Rp.        | 45,576,360           | Rp.        | 42,426,950           | 93.09%        |
| 3           | Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | Rp.        | 24,960,800           | Rp.        | 24,900,700           | 99.76%        |
| 4           | Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat                         | Rp.        | 92,143,400           | Rp.        | 83,716,243           | 90.85%        |
| 5           | Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja               | Rp.        | 35,900,400           | Rp.        | 35,425,606           | 98.68%        |
| 6           | Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai ASN Setda Prov. Sumbar *****                | Rp.        | 0                    | Rp.        | 0                    | 0.00%         |
| 7           | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                                   | Rp.        | 67,250,188           | Rp.        | 64,898,750           | 96.50%        |
| <b>VIII</b> | <b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>                                       | <b>Rp.</b> | <b>384,879,728</b>   | <b>Rp.</b> | <b>349,989,383</b>   | <b>90.93%</b> |
| 1           | Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota           | Rp.        | 39,112,335           | Rp.        | 33,066,550           | 84.54%        |
| 2           | Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik                              | Rp.        | 85,298,558           | Rp.        | 76,514,070           | 89.70%        |
| 3           | Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                                         | Rp.        | 80,462,585           | Rp.        | 70,278,243           | 87.34%        |
| 4           | Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)                               | Rp.        | 67,437,850           | Rp.        | 66,634,620           | 98.81%        |
| 5           | Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota                     | Rp.        | 112,568,400          | Rp.        | 103,495,900          | 91.94%        |
| <b>IX</b>   | <b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH</b>                               | <b>Rp.</b> | <b>1,446,340,048</b> | <b>Rp.</b> | <b>1,390,655,303</b> | <b>96.15%</b> |

|          |                                                                                                              |                          |                          |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1        | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat                                  | Rp. 343,000,000          | Rp. 337,348,258          | 98.35%        |
| 2        | Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat                           | Rp. 125,000,000          | Rp. 120,824,292          | 96.66%        |
| 3        | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                                 | Rp. 138,163,600          | Rp. 135,864,450          | 98.34%        |
| 4        | Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se-Sumatera Barat                                                              | Rp. 104,348,420          | Rp. 94,547,050           | 90.61%        |
| 5        | Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                                | Rp. 108,475,500          | Rp. 106,120,850          | 97.83%        |
| 6        | Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan                      | Rp. 116,219,039          | Rp. 106,829,500          | 91.92%        |
| 7        | Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan                                       | Rp. 511,133,489          | Rp. 489,120,903          | 95.69%        |
| <b>X</b> | <b>PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                                            | <b>Rp. 432,417,447</b>   | <b>Rp. 413,113,441</b>   | <b>95.54%</b> |
| 1        | Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota                                                              | Rp. 42,488,250           | Rp. 40,121,338           | 94.43%        |
| 2        | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat | Rp. 69,053,335           | Rp. 62,068,035           | 89.88%        |
| 3        | Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota             | Rp. 112,677,450          | Rp. 108,536,450          | 96.32%        |
| 4        | Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik                                                       | Rp. 208,198,412          | Rp. 202,387,618          | 97.21%        |
|          | <b>Total</b>                                                                                                 | <b>Rp. 5,013,398,173</b> | <b>Rp. 4,644,082,076</b> | <b>92.63%</b> |

Berdasarkan uraian diatas terhadap program kegiatan yang tidak tercapai target pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan secara umum dikarenakan adanya penghematan dalam pemakaian anggaran kegiatan serta adanya kebijakan dalam keuangan yang belum membolehkan pembayaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan dengan Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2016-2021 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-Undangan Kelembagaan
3. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik.
4. Meningkatnya tata kelola Organisasi

Untuk tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja Biro Organisasi diberikan anggaran sebesar **Rp. 2.203.033.638,-** untuk melaksanakan 9 program dengan 31 kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

| NO.       | PROGRAM/KEGIATAN                                            | PAGU 2019          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | 2                                                           | 3                  |
| <b>I</b>  | <b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                   | <b>349.362.654</b> |
|           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | 34.537.434         |
|           | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                | 31.998.920         |
|           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                   | 60.929.500         |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | 4.200.000          |
|           | Penyediaan Makanan dan Minuman                              | 13.000.000         |
|           | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 204.696.800        |
| <b>II</b> | <b>Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur</b>           | <b>88.004.762</b>  |
|           | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional      | 57.996.000         |

|             |                                                                                    |                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi                     | 8.250.000          |
|             | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor                           | 6.100.000          |
|             | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi                                      | 15.658.762         |
|             |                                                                                    |                    |
| <b>IV</b>   | <b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>      | <b>148.451.946</b> |
|             | Penatausahaan Keuangan SKPD                                                        | 106.491.946        |
|             | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD                                 | 20.000.000         |
|             | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD             | 21.960.000         |
|             |                                                                                    |                    |
| <b>V</b>    | <b>Peningkatan Manajemen SDM Aparatur</b>                                          | <b>158.277.400</b> |
|             | Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar                                           | 29.910.250         |
|             | Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda                      | 19.391.200         |
|             | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                                   | 33.187.300         |
|             | Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar                                 | 75.788.650         |
|             |                                                                                    |                    |
| <b>VI</b>   | <b>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan SKPD Provinsi Sumatera Barat</b> | <b>262.031.400</b> |
|             | Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat               | 100.000.000        |
|             | Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar    | 14.656.500         |
|             | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                      | 97.005.500         |
|             | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat  | 50.369.400         |
|             |                                                                                    |                    |
| <b>VII</b>  | <b>Manajemen Perubahan</b>                                                         | <b>195.396.800</b> |
|             | Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov. Sumbar           | 106.311.350        |
|             | Sosialisasi Reformasi Birokrasi                                                    | 89.085.450         |
|             |                                                                                    |                    |
| <b>VIII</b> | <b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>                                       | <b>31.602.850</b>  |
|             | Pembinaan Dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi Dan Kab/Kota           | 31.602.850         |
|             |                                                                                    |                    |
| <b>IX</b>   | <b>Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah</b>                               | <b>608.647.410</b> |
|             | Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                      | 34.080.160         |
|             | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                       | 60.258.800         |

|          |                                                                                               |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat                   | 330.147.450          |
|          | Penataan Jabatan Perangkat Daerah                                                             | 184.161.000          |
|          |                                                                                               |                      |
| <b>X</b> | <b>Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>361.258.416</b>   |
|          | Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik                                        | 198.335.596          |
|          | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi | 66.767.620           |
|          | Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota                                     | 96.155.200           |
|          |                                                                                               |                      |
|          | <b>JUMLAH :</b>                                                                               | <b>2.203.033.638</b> |

**TABEL T-C.29.**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BIRO ORGANISASI DAN PENCAPAIAN RENSTRA BIRO ORGANISASI S/D TAHUN 2020**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BIRO ORGANISASI**

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)     | TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2020 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017                                                                                                | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 |                                             |                        | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2019)                                                                                                                                  | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN |                 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                                                               |                                                             |                                        |                                                                                                                                                                            | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018                     | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | TINGKAT REALI-SASI (%) |                                                                                                                                                                                      | REALISASI CAPAIAN 2019                                      | TINGKAT CAPAIAN |
| 1    | 2                                                             | 3                                                           | 4                                      | 5                                                                                                                                                                          | 6                                                            | 7                                           | 8                      | 9                                                                                                                                                                                    | 10                                                          | 11              |
|      | <b>URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH</b>                            |                                                             |                                        |                                                                                                                                                                            | 5,221,596,585                                                | 4,846,469,694                               | 92.82%                 |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                 |
| I    | <b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                     | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran               | BB                                     |                                                                                                                                                                            | 696,063,909                                                  | 629,891,637                                 | 90.49%                 |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                 |
| 1    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                |                                                             | 3 Bulan                                | 3 Bulan                                                                                                                                                                    | 13,420,959                                                   | 8,637,201                                   | 64.36%                 | 12 Bulan                                                                                                                                                                             | 12 Bulan                                                    | 100%            |
| 2    | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik        | Kebutuhan Listrik Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi | 12 Bulan                               | 12 Bulan                                                                                                                                                                   | 3,876,000                                                    | 668,939                                     | 17.26%                 | 12 Bulan                                                                                                                                                                             | 12 Bulan                                                    | 100%            |
| 3    | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                  | Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kator                     | 12 Bulan                               | 12 Bulan                                                                                                                                                                   | 36,320,520                                                   | 27,931,520                                  | 76.90%                 | 12 Bulan                                                                                                                                                                             | 12 Bulan                                                    | 100%            |
| 4    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang     | 12 Bulan                               | Amplop (60) Kotak Kop Selda (25 Rim), Map Dinas (3000 Buah), Disposisi (24 Buku), Kwitansi (60 buku), Blanko SPPD (60 Buku), Kop Gubernur (10 Rim), Foto copy 53643 lembar | 64,167,750                                                   | 54,414,750                                  | 84.80%                 | Amplop 60 (Kotak) Kop Selda (25 Rim), Map Dinas (3000 Buah), Lembar Disposisi (24 Buku), Kwitansi (60 Buku) Blanko SPPD (60 Buku), Kop Gubernur (10 Rim), Photo Copy (59007 Lembar ) | 12 Bulan                                                    | 100%            |
| 5    | Penyediaan Makan dan Minum                                    | Pertemuan / Rapat yang diselenggarakan                      | 12 Bulan                               | 280 Orang                                                                                                                                                                  | 12,544,000                                                   | 9,100,000                                   | 72.54%                 | 464 Kotak                                                                                                                                                                            | 464 Kotak                                                   | 100%            |
| 6    | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah   | Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang diikuti  | 12 Kali Rapat                          | 148 Kali                                                                                                                                                                   | 565,734,680                                                  | 529,139,227                                 | 93.53%                 | 76 Kali                                                                                                                                                                              | 76 Kali                                                     | 100%            |
| II   | <b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>              |                                                             |                                        |                                                                                                                                                                            | 726,940,749                                                  | 630,051,767                                 | 86.67%                 |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                 |
| 1    | Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor                       |                                                             |                                        |                                                                                                                                                                            | 52,386,000                                                   | 44,100,000                                  | 84.18%                 | 1 Set Sound System Mixed Convergence                                                                                                                                                 | 1 Set Sound System Mixed Convergence                        | -               |

[illegible]

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN                      | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                              | TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2020                                                                             | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017                                            | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 |                                             |                        | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2019) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                        | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018                     | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | TINGKAT REALI-SASI (%) |                                                     | REALISASI CAPAIAN 2019                                      | TINGKAT CAPAIAN |
|      | III PROGRAM PERENCANAAN,PENGLOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASSET | Terkendalinya pelaksanaan kegiatan dan aset                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 20,452,500                                                   | 20,079,000                                  | 98.17%                 |                                                     |                                                             |                 |
|      | 1 Pengelolaan, pengawasan dan Pengendalian Aset OPD                                | Honorarium Pengelola Aset Daerah                                                                                                                     | 3 Orang/Bulan                                                                                                      | 12 Bulan                                                                                                               | 20,452,500                                                   | 20,079,000                                  | 98.17%                 | 12 Bulan                                            | 12 Bulan                                                    | 100%            |
|      | IV PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 59,759,699                                                   | 39,790,900                                  | 66.58%                 |                                                     |                                                             |                 |
|      | 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                       | PNS yang dapat mengikuti Bimtek                                                                                                                      | 12 Orang PNS                                                                                                       | 12 Orang                                                                                                               | 59,759,699                                                   | 39,790,900                                  | 66.58%                 | 12 Orang                                            | 12 Orang                                                    | 100%            |
|      | V PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN               | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                        | 204,033,050                                                  | 177,729,596                                 | 87.11%                 |                                                     |                                                             |                 |
|      |                                                                                    | Nilai evaluasi SAKIP SKPD                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                              |                                             |                        |                                                     |                                                             |                 |
|      |                                                                                    | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                              |                                             |                        |                                                     |                                                             |                 |
|      | 1 Penatausahaan Keuangan SKPD                                                      | Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator SIPKD                                                     | 1 Orang KPA, 4 Orang PPTK, 1 Orang Bendahara pengeluaran Pembantu dan 3 Orang Operator SKPD                        | 12 Bulan                                                                                                               | 146,951,300                                                  | 145,989,596                                 | 99.35%                 | 12 Bulan                                            | 12 Bulan                                                    | 100%            |
|      | 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD           | Jumlah Dokumen LAKIP OPD, LKPJ OPD, LPPD OPD, LAP KEU BIRO, Lap. Realisasi Anggaran ,Rentsra,Renja,Penetapan Kinerja Biro, Laporan Aset yang disusun | 10 Dokumen (LAKIP,LKPJ, LAP KEU BIRO, Lap Realisasi Anggaran, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja biro ,Laporan Aset | 10 Dokumen (LAKIP,LKPJ,LPPD, LAP KEU BIRO,Lap Realisasi Anggaran, Renstra,Renja, Penetapan Kinerja Biro, Laporan Aset) | 57,081,750                                                   | 31,740,000                                  | 55.60%                 | 10 Dokumen                                          | 10 Dokumen                                                  | 100%            |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)                                        | TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2020                                                       | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 |                                             |                       | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2019) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN |                 |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                                                               |                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018                     | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | TINGKAT REALISASI (%) |                                                     | REALISASI CAPAIAN 2019                                      | TINGKAT CAPAIAN |
|      | VI                                                            | PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMBAR                    | a. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah ( AKIP) Pemerintah Provinsi | BB                                                                          | 100%                                                         | 521,052,825                                 | 490,648,300           | 94.16%                                              | BB                                                          | BB              |
|      |                                                               |                                                                                                | b. Persentase SKPD dengan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kineja > 70-80                  | 70%                                                                         | -                                                            |                                             |                       | 70%                                                 |                                                             |                 |
|      | 1                                                             | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                                  | Jumlah Laporan Kinerja yang disusun                                                          | 1 Dokumen/65 Eksemplar                                                      | 1 Dokumen/65 Eksemplar                                       | 238,011,095                                 | 230,628,700           | 96.90%                                              | 1 Dokumen/65 Eksemplar                                      | 100%            |
|      | 2                                                             | Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov Sumbang                   | Jumlah OPD yang di Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja                                | 50 OPD                                                                      | 50 Opd                                                       | 39,802,200                                  | 36,802,900            | 92.46%                                              | 50 OPD                                                      | 100%            |
|      | 3                                                             | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintahan Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun                                               | 1 Dokumen /60 Eksemplar                                                     | 1 Dokumen/60 Eksemplar                                       | 81,476,830                                  | 72,775,600            | 89.32%                                              | 1 Dokumen /60 Eksemplar                                     | 100%            |
|      | 4                                                             | Bimbingan Tekhnis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se Sumbang                                 | Jumlah Peserta Bimtek dan Anggota Tim Akuntabilitas yang dilatih                             | 157 Orang Peserta Bimtek dan 15 ToT                                         |                                                              | 161,762,700                                 | 150,441,100           | 93.00%                                              | 157 Orang                                                   | 100%            |
|      |                                                               |                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                             |                       |                                                     |                                                             |                 |
|      | VII                                                           | MANAJEMEN PERUBAHAN                                                                            | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                   |                                                                             |                                                              | 184,500,800                                 | 181,574,600           | 98.41%                                              |                                                             |                 |
|      | 1                                                             | Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                             | Jumlah Peserta Sosialisasi (OPD Prov 50 Orang + Org Kab/Kota 19 Orang x 2 hari =138 Orang)   | 69 Orang                                                                    | 55 Orang Ess III dan Ess IV                                  | 184,500,800                                 | 181,574,600           | 98.41%                                              | 138 Orang                                                   | 100%            |
|      |                                                               |                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                             |                       |                                                     |                                                             |                 |
|      | VIII                                                          | PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH                                                  | a. Persentase SKPD Provinsi yang direkturisasi                                               |                                                                             |                                                              | 1,446,340,048                               | 1,390,655,303         | 96.15%                                              |                                                             |                 |
|      |                                                               |                                                                                                | Persentase SKPD Provinsi yang ditetapkan Rician tugas pokok dan fungsi                       |                                                                             |                                                              |                                             |                       |                                                     |                                                             |                 |
|      | 1                                                             | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                   | Laporan Ranperda Kab/ Kota yang difasilitasi                                                 | 1 Dokumen                                                                   | 19 Kab/Kota                                                  | 138,163,600                                 | 135,864,450           | 98.34%                                              | 10 Kab/Kota                                                 | 100%            |
|      | 2                                                             | Rakornis Kelembagaan Kab/kota se Sumatera Barat                                                | Jumlah Peserta Rakornis                                                                      | 38 Orang                                                                    | 76 Orang                                                     | 104,348,420                                 | 94,547,050            | 90.61%                                              | 38 Orang                                                    | 100%            |
|      | 3                                                             | Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/kota                                  | Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                        | 1 Dokumen                                                                   | 19 Kab/Kota                                                  | 108,475,500                                 | 106,120,850           | 97.83%                                              | 1 Dokumen                                                   | 100%            |
|      | 4                                                             | Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan        | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja dalam rangka penetapan kelas jabatan    | 50 Orang Peserta                                                            | 50 Peserta                                                   | 116,219,039                                 | 106,829,500           | 91.92%                                              |                                                             |                 |
|      | 5                                                             | Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan                         | Dokumen Draft Anjab dan ABK                                                                  | 1 Ranpergub                                                                 | 46 Badan/Dinas/Biro                                          | 511,133,489                                 | 489,120,903           | 95.69%                                              |                                                             |                 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)                                                      | TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2020                               | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 |                                             |                        | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2019) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN |                                            |      |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|      |                                                               |                                                                                                              |                                                                      |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018                     | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | TINGKAT REALI-SASI (%) |                                                     | REALISASI CAPAIAN 2019                                      | TINGKAT CAPAIAN                            |      |
|      | 6                                                             | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat                                  | Tersusunnya produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah | Perda/Pergub                                                                | 22 Ranpergub/Produk Hukum Daerah                             | 343,000,000                                 | 337,348,258            | 98.35%                                              | 100%                                                        | 100%                                       | 100% |
|      | 7                                                             | Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat                           | Tersusunnya produk hukum daerah terkait Tupoksi Perangkat Daerah     | 5 Ranpergub                                                                 | 38 Ranpergub                                                 | 125,000,000                                 | 120,824,292            | 96.66%                                              | 100%                                                        | 100%                                       | 100% |
|      |                                                               |                                                                                                              |                                                                      |                                                                             |                                                              |                                             |                        |                                                     |                                                             |                                            |      |
|      | IX                                                            | PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH                                                           | a.Persentase SKPD SOP yang telah dievaluasi                          | 10%                                                                         | -                                                            | 640,615,859                                 | 615,501,059            | 96.08%                                              |                                                             |                                            |      |
|      | 1                                                             | Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan kab/kota             | Jumlah SOP yang tersusun                                             | 10 SOP OPD                                                                  | 4 Kab/Kota                                                   | 112,677,450                                 | 108,536,450            | 96.32%                                              | 15 SOP OPD                                                  | 15 SOP OPD                                 | 100% |
|      | 2                                                             | Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota                                                              | Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan                                 | 4 Kab/Kota                                                                  | 4 Kab/Kota                                                   | 42,488,250                                  | 40,121,338             | 94.43%                                              | 4 Kab/Kota                                                  | 4 Kab/Kota                                 | 100% |
|      | 3                                                             | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat | Jumlah Peserta yang mengikuti FORKOMPANDA                            | 50 Orang                                                                    | 60 Orang                                                     | 69,053,335                                  | 62,068,035             | 89.88%                                              | 60 Orang                                                    | 60 Orang                                   | 100% |
|      | 4                                                             | Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik                                                       | Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai                            | 10 Unit UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota                                  |                                                              | 208,198,412                                 | 202,387,618            | 97.21%                                              | 10 Unit UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota                  | 10 Unit UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota | 100% |
|      | 5                                                             | Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat                       | Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai                            | 10 Unit UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota                                  | 10 UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota                        | 208,198,412                                 | 202,387,618            | 97.21%                                              | 10 Unit UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota                  | 10 Unit UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota | 100% |
|      |                                                               |                                                                                                              |                                                                      |                                                                             |                                                              |                                             |                        |                                                     |                                                             |                                            |      |
|      | X                                                             | PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR                                                                   | a. Persentase PNS Setda Provinsi Sumatera Barat yang dilayani        |                                                                             |                                                              | 336,957,418                                 | 320,558,149            |                                                     |                                                             |                                            |      |
|      | 1                                                             | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                                                             | Jumlah PNS Setda yang dilayani                                       | 550 Orang                                                                   | 550 Orang                                                    | 67,250,188                                  | 64,898,750             | 96.50%                                              | 550 Orang                                                   | 550 Orang                                  | 100% |
|      | 2                                                             | Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar              | 1 Dokumen /20 Buku                                                          | 1 Dokumen/10 Buku                                            | 71,126,270                                  | 69,189,900             | 97.28%                                              | 1 Dokumen                                                   | 1 Dokumen                                  | 100% |
|      | 3                                                             | Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian                                                      | Jumlah Laporan Data Kepegawaian                                      | 4 Dokumen/ 20 Eksemplar                                                     | 7 Dokumen                                                    | 45,576,360                                  | 42,426,950             | 93.09%                                              | 4 Dokumen                                                   | 4 Dokumen                                  | 100% |
|      | 4                                                             | Monitoring Pengembangan Karir PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                           | Laporan Pengembangan Karir PNS di Lingkungan Pemprov Sumbar          | 1 Dokumen                                                                   | 1 Dokumen                                                    | 24,960,800                                  | 24,900,700             | 99.76%                                              |                                                             |                                            |      |
|      | 5                                                             | Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar                                                           | Jumlah Peserta Rakornis ( 19 Kab/Kota x 2 Orang x 2 hari )=76 orang  | 38 Orang                                                                    | 50 Orang                                                     | 92,143,400                                  | 83,716,243             | 90.85%                                              | 100%                                                        | 100%                                       | 100% |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/ KEGIATAN (OUTPUT)                         | TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2020                       | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 |                                             |                        | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2019) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN |                         |      |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
|      |                                                               |                                                                                |                                                              |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018                     | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | TINGKAT REALI-SASI (%) |                                                     | REALISASI CAPAIAN 2019                                      | TINGKAT CAPAIAN         |      |
|      | 6                                                             | Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja             | Tersedianya Data Tentang tenaga PPPK                         | 1 Dokumen                                                                   | 1 Laporan                                                    | 35,900,400                                  | 35,425,606             | 98.68%                                              | 1 Laporan                                                   | 1 Laporan               | 100% |
|      | 7                                                             | Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai ASN Prov. Sumbar                        | Tercetaknya kartu tanda pengenal pegawai ASN di lingkungan   | 1300 Orang                                                                  | 535 Orang                                                    | -                                           | -                      | -                                                   |                                                             |                         |      |
|      | 8                                                             | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai ASN di Lingkungan Pemprov. Sumbar |                                                              |                                                                             | 100 Orang                                                    |                                             |                        |                                                     |                                                             |                         |      |
|      |                                                               |                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                              |                                             |                        |                                                     |                                                             |                         |      |
|      | XI                                                            | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                                  | a. Persentase UKPP Provinsi yang dilakukan pengukuran IKMnya | 70%                                                                         | -                                                            | 384,879,728                                 | 349,989,383            | 90.93%                                              |                                                             |                         |      |
|      |                                                               |                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                              |                                             |                        |                                                     |                                                             |                         |      |
|      | 1                                                             | Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota       | Percepatan Pelayanan Pada Unit Pelayanan Yang di bina        | 6 unit kerja pelayanan publik                                               | 6 UKPP                                                       | 39,112,335                                  | 33,066,550             | 84.54%                                              | 6 unit kerja pelayanan publik                               | 6 unit pelayanan publik | 100% |
|      | 2                                                             | Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik                          | Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Prov. Sumbar             | 2 Laporan                                                                   | 2 Laporan                                                    | 85,298,558                                  | 76,514,070             | 89.70%                                              | 2 Laporan                                                   | 2 Laporan               | 100% |
|      | 3                                                             | Pembinaan survey Kepuasan Masyarakat                                           | Jumlah Peserta                                               | 5 Orang                                                                     | 50 Orang                                                     | 80,462,585                                  | 70,278,243             | 87.34%                                              | 5 Orang                                                     |                         |      |
|      | 4                                                             | Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)                           | Laporan / Penyusunan dan Penerapan SPM                       | 4 laporan                                                                   | 4 Laporan                                                    | 67,437,850                                  | 66,634,620             | 98.81%                                              | 4 laporan                                                   | 4 laporan               | 100% |
|      | 5                                                             | Rapat koordinasi teknis pelayanan publik Provinsi dan Kab/Kota                 | Jumlah Peserta Rakornis Pelayanan Publik                     | 100 Orang                                                                   |                                                              | 112,568,400                                 | 103,495,900            | 91.94%                                              | 100 Orang                                                   | 100 Orang               | 100% |
|      |                                                               |                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                              |                                             |                        |                                                     |                                                             |                         |      |

Padang, Januari 2019  
KEPALA BIRO ORGANISASI

  
IRWAN, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19680415 198902 1 001

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bukan merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Ombudsmen Provinsi Sumatera Barat, tingkat kepatuhan Biro Organisasi terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik termasuk Zona Hijau, dan untuk meningkatkan fungsi- fungsi pelayanan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Biro Organisasi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Disamping itu pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi adalah melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 dan Nomor 12 Tahun 2017 sebagai upaya untuk meningkatkan terciptanya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Berdasarkan perencanaan strategis biro organisasi 2016-2021 dari visi misi yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan diwujudkan untuk 5 (lima) tahun adala sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan
- c. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik
- d. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Untuk tahun 2018 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

| No | Tujuan                     | Sasaran                                                | Indikator Kinerja                               | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | 2                          | 3                                                      | 4                                               | 5      | 6         | 7           |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di | Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A | 2      | 1         | 50          |

|                                                    |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                         |                            |                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                                    | Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi | Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                                            |                                                                                                                                                                                    |                         |                            |                             |
| 2.                                                 | Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran   | Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan | Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan                                                                                                           | 60                      | 76                         | 126,67                      |
| 3.                                                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                        | Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik                                                    | Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan                                                                                                                                    | 10                      | 10                         | 100                         |
| 4.                                                 | Meningkatnya Kinerja Organisasi                               | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi                                                      | 4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja<br>4.2 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan<br>- Realisasi Fisik (%)<br>- Realisasi Keuangan (%) | BB<br><br><br>100<br>95 | BB<br><br><br>100<br>92.63 | 100<br><br><br>100<br>97,51 |
| <b>Jumlah Capaian .....</b>                        |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                         |                            | <b>547,51</b>               |
| <b>Rata - rata capaian indikator kinerja .....</b> |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                         |                            | <b>91,25</b>                |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja 4 (Empat) sasaran strategis telah dapat direalisasi dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 6 (enam) indikator kinerja sebesar 91,25 %.

Untuk dapat melihat Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

**Tabel T-C. 30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO ORGANISASI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN                                                                            | SPM/<br>STANDAR | IKK (PP<br>6/2008) | TARGET RENSTRA SKPD (TAHUN) |      |      |      | REALISASI CAPAIAN |       | PROYEKSI |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------|------|------|-------------------|-------|----------|------|
|    |                                                                                                      |                 |                    | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2017              | 2018  | 2019     | 2020 |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi             |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | - Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi          | -               | -                  | -                           | BB   | -    | -    | BB                | -     | -        | -    |
|    | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | - Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A                                                    |                 |                    |                             | 2    | 5    | 8    | -                 | 1     | 5        | 8    |
| 2  | Meningkatnya Penataan Kelembagaan yang tepat Fungsi dan Tepat Ukuran                                 |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | - Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan                       | -               | -                  | 55%                         | -    | -    | -    | 76,09%            | -     | -        | -    |
|    | Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-Undangan Kelembagaan             |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | - Persentase OPD yang pembentukannya sesuai Perundang-Undangan Kelembagaan                           |                 |                    |                             | 60%  | 70%  | 90%  |                   | 76%   | 70%      | 90%  |
| 3  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                               |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | - Rata-rata IKM                                                                                      | -               | -                  | 75                          | -    | -    | -    | 80,58             | -     | -        | -    |
|    | Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik                                                                |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | - Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan                                                    |                 |                    | -                           | 10   | 10   | 15   | -                 | 10    | 10       | 15   |
| 4  | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi                                                                  |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | 4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi                                             | -               | -                  | -                           | B    | B    | B    | B                 | B     | BB       | A    |
|    | 4.2 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan                    |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | - Realisasi Fisik (%)                                                                                | -               | -                  | 100                         | -    | -    | -    | 100               | -     | -        | -    |
|    | - Realisasi Keuangan (%)                                                                             | -               | -                  | 95                          | -    | -    | -    | 90,77             | -     | -        | -    |
|    | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi                                                                  |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | 4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                             |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | 4.2 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuanga Pelaksanaan Program                               |                 |                    |                             |      |      |      |                   |       |          |      |
|    | - Realisasi Fisik (%)                                                                                | -               | -                  | -                           | 100  | 100  | 100  | -                 | 100   | 100      | 100  |
|    | - Realisasi Keuangan (%)                                                                             | -               | -                  | -                           | 95   | 95   | 95   | -                 | 92,63 | 95       | 95   |

### 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan Biro Organisasi sebagai salah satu unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat mencakup pelayanan penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah, pelayanan penguatan kualitas ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal-hal kritis dikaitkan dengan organisasi perangkat daerah, dan Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran, telah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
- b. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi telah melakukan review terhadap SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan.
- c. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
- d. Untuk mengetahui permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengelolaan pengaduan berbasis aplikasi LAPOR-SP4N.
- e. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
  - 1) Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2) Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

- f. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan program aksi sebagaimana yang telah diterapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.

Dalam mensinergikan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Organisasi terlebih dahulu telah melakukan sinkronisasi dengan kabupaten/kota agar apa yang direncanakan Biro Organisasi dapat pula ditindaklanjuti oleh bagian organisasi kabupaten /kota antara lain terhadap pelaksanaan tugas pembinaan pelayanan publik, penguatan ketatalaksanaan, penataan kelembagaan, pembinaan penyusunan analisis jabatan, pembinaan pelaksanaan akuntabilitas dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait terutama untuk mencapai keberhasilan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Biro Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dirangkum dalam suatu program dan kegiatan, Biro Organisasi mempunyai permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

#### **1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Pada tahun 2016 Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan permasalahan terjadi adalah kurang optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Disamping itu permasalahan lainnya adalah :

- a. Masih adanya OPD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya OPD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke OPD lain yang mengakibatkan turunnya type OPD.
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja
- c. Masih adanya peraturan pedoman nomenklatur yang belum diterbitkan oleh pemerintah pusat, sehingga sebagian perangkat daerah dalam menyusun nomenklatur jabatan dan tugas pokok dan fungsi belum mengacu kepada aturan yang baku.

## **2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

### **a. *Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik***

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah masih belum optimalnya sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penggunaan Aplikasi Lapor SP4N oleh masyarakat guna penyampaian keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dikarenakan keterbatasan anggaran, dan permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk yang telah disampaikan oleh admin LAPOR-SP4N kepada pejabat penghubung yang berada pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### **b. *Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik***

Permasalahan dalam melaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik adalah waktu untuk pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai, hal ini diakibatkan banyaknya Unit Kerja Pelayanan Publik baik yang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Unit Kerja Pelayanan Publik Kabupaten / Kota, dan untuk tahun 2018 seluruh Tim Penilai berada pada 1 (satu) Tim, namun untuk pelaksanaan penilaian anggota Tim dibagi dan untuk menentukan 5 (lima) besar

dilaksanakan kembali penilaian, sehingga hasilnya penilaian akan lebih maksimal dan menghasilkan pemenang yang betul telah siap dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengembangan pelayanan publik. Permasalahan lainnya adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten / Kota masih belum sempurna dan masih adanya inovasi yang ditampilkan belum menyentuh kepada masyarakat secara umum terhadap pelayanan yang diterima masyarakat.

**c. Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan survey kepuasan masyarakat yang bertujuan agar adanya persamaan persepsi dan pemahaman bagi aparatur pelaksana pelayanan publik pada OPD tentang pentingnya survey kepuasan masyarakat dalam mengetahui kekurangan pelayanan dan mencari masukan dari masyarakat untuk pengembangan pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum seluruhnya OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat
- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat belum diselenggarakan secara berkala sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**d. Perbaikan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah**

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya kembali dilakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

### **3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten, disamping itu masih rendahnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat struktural dan seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja masing-masing perangkat daerahnya.
- b. Masih perlunya keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.

### **4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Peran birokrasi pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sangat strategis, maka untuk itu perlu dilakukan perubahan atau penataan birokrasi melalui suatu program, yaitu Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan keprofesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum sesuai sebagaimana yang diharapkan, persoalan yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi tersebut dikarenakan belum semuanya Organisasi Perangkat Daerah memahami tentang penerapan rencana aksinya. Kendala lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Konsistensi kebijakan yang terkait dengan aspek reformasi birokrasi masih kurang.
- b. Evaluasi reformasi birokrasi dan indikatornya belum dipahami dengan baik sehingga target nilai reformasi birokrasi sulit untuk ditetapkan.

- c. Belum adanya laporan pelaksana reformasi birokrasi dari OPD yang menyangkut kepada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
- d. Belum semuanya OPD membentuk tim reformasi birokrasi.
- e. Belum adanya evaluasi terhadap program aksi reformasi birokrasi pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain kurangnya informasi dari OPD tentang capaian kinerja Provinsi terkait dengan keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas telah dilakukan perumuskan indikator kinerja yang spesifik dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pengelolaan data kinerja yang lebih baik.

Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur yang diselaraskan dengan adanya penataan kelembagaan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan yaitu terutama pemahaman apartur tentang pentingnya Standar Operasional Prosedur, serta belum memahaminya bagaimana proses penyusunan suatu Standar Operasional Prosedur. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemberian bimbingan langsung kepada aparatur dalam tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik masih ditemui hambatan – hambatan diantaranya adanya pengaduan masyarakat yang berulang – ulang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik dari unsur petugas pelayanan maupun sarana dan prasarana pelayanan, serta masih adanya unit kerja pelayanan publik yang belum menganggar biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengingatkan UKPP untuk dapat menganggarkan biaya untuk pelaksanaan Survey

Kepuasan Masyarakat, sehingga pembinaan survey kepuasan masyarakat dapat dilakukan oleh Biro Organisasi dengan baik.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kelembagaan dan analisis jabatan telah dilakukan penyusunan perencanaan kegiatan penataan kelembagaan dan penyusunan dan pembinaan analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan dan permasalahan yang timbul salah satunya adalah belum adanya Diklat teknis yang memadai bagi analis pada OPD terkait analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan Usaha mengatasinya adalah melaksanakan bimbingan dan pembinaan ke OPD untuk memantau dan mengumpulkan hasil evaluasi jabatan beserta kelengkapan bahannya dalam memaksimalkan target penyelesaian kegiatan evaluasi jabatan.

Dari kegiatan yang ada setelah dilaksanakan telah dilakukan review dari rancangan awal kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dalam perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

**TABEL T-C.31.**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NAMA SKPD : BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SUMBAR**

| No. | RANCANGAN AWAL RKPD                                         |                 |                                                                            |                                               |                          | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                    |                 |                                                                            |                                               |                |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|     | PROGRAM /KEGIATAN                                           | LOKASI          | INDIKATOR KINERJA                                                          | TARGET CAPAIAN                                | PAGU INDIKATIF (Rp. 000) | PROGRAM / KEGIATAN                                          | LOKASI          | INDIKATOR KINERJA                                                          | TARGET CAPAIAN                                | KEBUTUHAN DANA |
| 1   | 2                                                           | 3               | 4                                                                          | 5                                             | 6                        | 7                                                           | 8               | 9                                                                          | 10                                            | 11             |
|     | URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH                                 |                 |                                                                            |                                               | 5,025,000,002            | URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH                                 |                 |                                                                            |                                               | 5,025,000,002  |
| I   | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                          | Provinsi        | Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100%                                          | 591,049,117              | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                          | Provinsi        | Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100%                                          | 591,049,117    |
| 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Provinsi        | Tersedianya Sarana Surat Menyurat dan Honorarium Tenaga Administrasi       | 12 Bulan                                      | 66,938,868               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Provinsi        | Tersedianya Sarana Surat Menyurat dan Honorarium Tenaga Administrasi       | 12 Bulan                                      | 66,938,868     |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Provinsi        | Kebutuhan Listrik Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi                | 12 Bulan                                      | 4,200,000                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Provinsi        | Kebutuhan Listrik Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi                | 12 Bulan                                      | 4,200,000      |
| 3   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                | Provinsi        | Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor                                   | 12 Bulan                                      | 31,998,920               | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                | Provinsi        | Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor                                   | 12 Bulan                                      | 31,998,920     |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Provinsi        | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang Operasional Kantor | 12 Bulan                                      | 39,488,129               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Provinsi        | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang Operasional Kantor | 12 Bulan                                      | 39,488,129     |
| 5   | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Provinsi        | Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang diikuti                 | 12 Bulan                                      | 435,423,200              | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Provinsi        | Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang diikuti                 | 12 Bulan                                      | 435,423,200    |
| 6   | Penyediaan Makanan dan Minuman                              | Provinsi        | Pertemuan / Rapat yang diselenggarakan                                     | 12 Bulan                                      | 13,000,000               | Penyediaan Makanan dan Minuman                              | Provinsi        | Pertemuan / Rapat yang diselenggarakan                                     | 12 Bulan                                      | 13,000,000     |
| II  | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                   | Provinsi        | Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                               | 193,768,850              | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                   | Provinsi        | Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                               | 193,768,850    |
|     |                                                             |                 | Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona Hijau)          |                                               |                          |                                                             |                 | Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona Hijau)          |                                               |                |
| 1   | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi               | Provinsi Sumbar | Jumlah Komputer PC/Desktop dan Printer yang diadakan                       | 2 Unit Komputer PC/Desktop dan 3 Unit Printer | 39,000,000               | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi               | Provinsi Sumbar | Jumlah Komputer PC/Desktop dan Printer yang diadakan                       | 2 Unit Komputer PC/Desktop dan 3 Unit Printer | 39,000,000     |
| 2   | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional                      | Provinsi Sumbar | Tersedianya Kendaraan Roda 2                                               | 1 Unit Roda 2                                 | 25,000,000               | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional                      | Provinsi Sumbar | Tersedianya Kendaraan Roda 2                                               | 1 Unit Roda 2                                 | 25,000,000     |

| No. | RANCANGAN AWAL RKP                                                 |                 |                                                                                   |                                                                        |                          | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                           |                 |                                                                                   |                                                                        |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | PROGRAM /KEGIATAN                                                  | LOKASI          | INDIKATOR KINERJA                                                                 | TARGET CAPAIAN                                                         | PAGU INDIKATIF (Rp. 000) | PROGRAM / KEGIATAN                                                 | LOKASI          | INDIKATOR KINERJA                                                                 | TARGET CAPAIAN                                                         | KEBUTUHAN DANA |
| 3   | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Provinsi Sumbar | Jumlah TV dan Dispenser yang diadakan                                             | 1 Unit TV dan 1 Unit Dispenser                                         | 6,500,000                | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Provinsi Sumbar | Jumlah TV dan Dispenser yang diadakan                                             | 1 Unit TV dan 1 Unit Dispenser                                         | 6,500,000      |
| 4   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional           | Provinsi Sumbar | Kendaraan Operasional / Dinas yang terpelihara                                    | 4 Unit Roda 4 dan 1 Unit Roda 2                                        | 106,818,850              | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional           | Provinsi Sumbar | Kendaraan Operasional / Dinas yang terpelihara                                    | 4 Unit Roda 4 dan 1 Unit Roda 2                                        | 106,818,850    |
| 5   | Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor        | Provinsi Sumbar | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor AC Split dan Mesin Ketik yang dipelihara | 10 Unit AC Split dan 3 Unit Mesin Ketik                                | 8,200,000                | Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor        | Provinsi Sumbar | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor AC Split dan Mesin Ketik yang dipelihara | 10 Unit AC Split dan 3 Unit Mesin Ketik                                | 8,200,000      |
| 6   | Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi    | Provinsi Sumbar | Komputer PC, Desktop,Laptop/Notebook dan Printer dipelihara                       | 5 Unit Komputer PC/Desktop ,5 Unit Laptop /Notebook dan 5 Unit Printer | 8,250,000                | Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi    | Provinsi Sumbar | Komputer PC, Desktop,Laptop/Notebook dan Printer dipelihara                       | 5 Unit Komputer PC/Desktop ,5 Unit Laptop /Notebook dan 5 Unit Printer | 8,250,000      |
| III | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                         | Provinsi        | Rata-Rata Lamanya PNS mengikuti diklat                                            |                                                                        | 57,411,347               | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                         | Provinsi        | Rata-Rata Lamanya PNS mengikuti diklat                                            |                                                                        | 57,411,347     |
| 1   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         | Provinsi        | PNS yang mengikuti Bimtek                                                         | 17 Orang PNS                                                           | 57,411,347               | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         | Provinsi        | PNS yang mengikuti Bimtek                                                         | 17 Orang PNS                                                           | 57,411,347     |
| IV  | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN | Provinsi        | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD               |                                                                        | 220,831,538              | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN | Provinsi        | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD               |                                                                        | 220,831,538    |
|     |                                                                    |                 | Nilai evaluasi SAKIP SKPD                                                         |                                                                        |                          |                                                                    |                 | Nilai evaluasi SAKIP SKPD                                                         |                                                                        |                |
|     |                                                                    |                 | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan              |                                                                        |                          |                                                                    |                 | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan              |                                                                        |                |
| 1   | Penatausahaan Keuangan SKPD                                        | Provinsi        | Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA, PPTK, Bendahara, Operator SIPKD dan PTT  | 12 Bulan                                                               | 114,343,496              | Penatausahaan Keuangan SKPD                                        | Provinsi        | Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA, PPTK, Bendahara, Operator SIPKD dan PTT  | 12 Bulan                                                               | 114,343,496    |

| No. | RANCANGAN AWAL RKPD                                                               |                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                          | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                          |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | PROGRAM /KEGIATAN                                                                 | LOKASI             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                      | TARGET CAPAIAN                                                                                                            | PAGU INDIKATIF (Rp. 000) | PROGRAM / KEGIATAN                                                                | LOKASI            | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                      | TARGET CAPAIAN                                                                                                            | KEBUTUHAN DANA |
| 2   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | Provinsi           | Jumlah Dokumen LAKIP OPD, LKPJ OPD, LPPD OPD, LAP KEU BIRO, Lap. Realisasi Anggaran, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja Biro, Laporan Aset yang disusun | 10 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, LAP KEU BIRO, Lap Realisasi Anggaran, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja biro, Laporan Aset | 79,897,000               | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | Provinsi          | Jumlah Dokumen LAKIP OPD, LKPJ OPD, LPPD OPD, LAP KEU BIRO, Lap. Realisasi Anggaran, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja Biro, Laporan Aset yang disusun | 10 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, LAP KEU BIRO, Lap Realisasi Anggaran, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja biro, Laporan Aset | 79,897,000     |
|     | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD                                |                    | Honorarium Pengelola Aset Daerah                                                                                                                       | 12 Bulan                                                                                                                  | 26,591,042               | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD                                |                   | Honorarium Pengelola Aset Daerah                                                                                                                       | 12 Bulan                                                                                                                  | 26,591,042     |
| V   | PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR                                        | Provinsi           | Peringkat Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar                                                                                          | B                                                                                                                         | 467,643,257              | PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR                                        | Provinsi          | Peringkat Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar                                                                                          | B                                                                                                                         | 467,643,257    |
|     |                                                                                   |                    | Peringkat Hasil Laporan Kajian 10 Kab/kota                                                                                                             |                                                                                                                           |                          |                                                                                   |                   | Peringkat Hasil Laporan Kajian 10 Kab/kota                                                                                                             |                                                                                                                           |                |
| 1   | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                     | Pemprov            | Jumlah Laporan Kinerja yang disusun                                                                                                                    | 1 Dokumen /55 Eksemplar                                                                                                   | 174,438,757              | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                     | Pemprov           | Jumlah Laporan Kinerja yang disusun                                                                                                                    | 1 Dokumen /55 Eksemplar                                                                                                   | 174,438,757    |
| 2   | Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar   | Pemprov            | Jumlah OPD yang di Monev pencapaian target Perjanjian Kinerja                                                                                          | 50 OPD                                                                                                                    | 41,645,200               | Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar   | Pemprov           | Jumlah OPD yang di Monev pencapaian target Perjanjian Kinerja                                                                                          | 50 OPD                                                                                                                    | 41,645,200     |
| 3   | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat | Provinsi           | Jumlah Dokumen perjanjian Kinerja yang disusun                                                                                                         | 1 Dokumen /55 Eksemplar                                                                                                   | 92,330,900               | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat | Provinsi          | Jumlah Dokumen perjanjian Kinerja yang disusun                                                                                                         | 1 Dokumen /55 Eksemplar                                                                                                   | 92,330,900     |
| 4   | Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se- Sumatera Barat             | Provinsi/Kab/ Kota | Jumlah Peserta Bimtek                                                                                                                                  | 110 Orang                                                                                                                 | 159,228,400              | Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se- Sumatera Barat             | Provinsi/Kab/Kota | Jumlah Peserta Bimtek                                                                                                                                  | 110 Orang                                                                                                                 | 159,228,400    |
| VI  | MANAJEMEN PERUBAHAN                                                               | Provinsi           | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                             | B                                                                                                                         | 388,050,267              | MANAJEMEN PERUBAHAN                                                               | Provinsi          | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                             | B                                                                                                                         | 388,050,267    |
| 1   | Sosialisasi Reformasi Birokrasi                                                   | Provinsi           | Jumlah Peserta Sosialisasi                                                                                                                             | 125 Orang                                                                                                                 | 139,437,667              | Sosialisasi Reformasi Birokrasi                                                   | Provinsi          | Jumlah Peserta Sosialisasi                                                                                                                             | 125 Orang                                                                                                                 | 139,437,667    |
| 2   | Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov. Sumbar          | Povinsi            | Jumlah Peserta Coaching                                                                                                                                | 150 Orang                                                                                                                 | 248,612,600              | Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov. Sumbar          | Povinsi           | Jumlah Peserta Coaching                                                                                                                                | 150 Orang                                                                                                                 | 248,612,600    |

| No.  | RANCANGAN AWAL RKPd                                                                           |          |                                                                                            |                             |                          | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                      |          |                                                                                            |                             |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|      | PROGRAM /KEGIATAN                                                                             | LOKASI   | INDIKATOR KINERJA                                                                          | TARGET CAPAIAN              | PAGU INDIKATIF (Rp. 000) | PROGRAM / KEGIATAN                                                                            | LOKASI   | INDIKATOR KINERJA                                                                          | TARGET CAPAIAN              | KEBUTUHAN DANA |
| VII  | <b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH</b>                                          |          | Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan                                      |                             | 1,485,824,717            | <b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH</b>                                          |          | Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan                                      |                             | 1,485,824,717  |
|      |                                                                                               |          | Persentase Penurunan Rician Tupoksi Yang Tumpang Tindih                                    |                             |                          |                                                                                               |          | Persentase Penurunan Rician Tupoksi Yang Tumpang Tindih                                    |                             |                |
| 1    | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat                   | Provinsi | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah                       | 1 Ranperda/Ranpergub        | 381,513,834              | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat                   | Provinsi | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah                       | 1 Ranperda/Ranpergub        | 381,513,834    |
| 2    | Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sumatera Barat                        | Provinsi | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Tupoksi Perangkat Daerah                           | 10 Ranpergub                | 150,734,133              | Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sumatera Barat                        | Provinsi | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Tupoksi Perangkat Daerah                           | 10 Ranpergub                | 150,734,133    |
| 3    | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                  | Provinsi | Laporan Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi                                                | 1 Dokumen                   | 207,999,900              | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                  | Provinsi | Laporan Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi                                                | 1 Dokumen                   | 207,999,900    |
| 4    | Rakornis Kelembagaan Kab/kota se- Sumatera Barat                                              | Provinsi | Jumlah Peserta Rakornis                                                                    | 38 Orang                    | 111,375,150              | Rakornis Kelembagaan Kab/kota se- Sumatera Barat                                              | Provinsi | Jumlah Peserta Rakornis                                                                    | 38 Orang                    | 111,375,150    |
| 5    | Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                 | Provinsi | Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                      | 1 Dokumen                   | 118,000,000              | Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                 | Provinsi | Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                                      | 1 Dokumen                   | 118,000,000    |
| 6    | Bimbingan Teknis Penataan Jabatan                                                             | Provinsi | Jumlah Peserta Bimtek Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah                       | 55 Orang                    | 116,201,500              | Bimbingan Teknis Penataan Jabatan                                                             | Provinsi | Jumlah Peserta Bimtek Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah                       | 55 Orang                    | 116,201,500    |
| 7    | Penataan Jabatan Perangkat Daerah                                                             | Provinsi | Tersusunnya Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan pada Kab/Kota | 1 Ranpergub dan 19 Kab/Kota | 400,000,200              | Penataan Jabatan Perangkat Daerah                                                             | Provinsi | Tersusunnya Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan pada Kab/Kota | 1 Ranpergub dan 19 Kab/Kota | 400,000,200    |
| VIII | <b>PENGUATAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                            | Provinsi | Persentase SKPD Yang Menerapkan SOP Secara Baik                                            |                             | 678,190,974              | <b>PENGUATAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                            | Provinsi | Persentase SKPD Yang Menerapkan SOP Secara Baik                                            |                             | 678,190,974    |
| 1    | Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota                                               | Provinsi | Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan                                                       | 4 Kab/Kota                  | 61,134,224               | Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota                                               | Provinsi | Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan                                                       | 4 Kab/Kota                  | 61,134,224     |
| 2    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi | Provinsi | Jumlah Peserta yang mengikuti Forkompanda                                                  | 40 Orang                    | 86,607,500               | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi | Provinsi | Jumlah Peserta yang mengikuti Forkompanda                                                  | 40 Orang                    | 86,607,500     |
| 3    | Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota                                     | Provinsi | Jumlah SOP yang tersusun                                                                   | 6 SOP OPD                   | 157,101,300              | Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota                                     | Provinsi | Jumlah SOP yang tersusun                                                                   | 6 SOP OPD                   | 157,101,300    |

| No. | RANCANGAN AWAL RKPd                                                      |                   |                                                                                     |                                       |                          | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                 |                   |                                                                                     |                                       |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|     | PROGRAM /KEGIATAN                                                        | LOKASI            | INDIKATOR KINERJA                                                                   | TARGET CAPAIAN                        | PAGU INDIKATIF (Rp. 000) | PROGRAM / KEGIATAN                                                       | LOKASI            | INDIKATOR KINERJA                                                                   | TARGET CAPAIAN                        | KEBUTUHAN DANA |
| 4   | Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik                   | Provinsi          | Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai                                           | 10 UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota | 373,347,950              | Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik                   | Provinsi          | Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai                                           | 10 UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota | 373,347,950    |
|     |                                                                          |                   |                                                                                     |                                       |                          |                                                                          |                   |                                                                                     |                                       |                |
| IX  | <b>PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>                                | Provinsi          | Laporan Pelayanan Administrasi Kepegawaian                                          | 100%                                  | 515,721,964              | <b>PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>                                | Provinsi          | Laporan Pelayanan Administrasi Kepegawaian                                          |                                       | 515,721,964    |
| 1   | Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar                                 | Provinsi Sumbar   | Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov Sumbar                              | 2 Dokumen                             | 91,385,300               | Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar                                 | Provinsi Sumbar   | Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov Sumbar                              | 2 Dokumen                             | 91,385,300     |
| 2   | Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda            | Provinsi Sumbar   | Jumlah Laporan Data Kepegawaian                                                     | 10 Dokumen                            | 68,700,600               | Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda            | Provinsi Sumbar   | Jumlah Laporan Data Kepegawaian                                                     | 10 Dokumen                            | 68,700,600     |
| 3   | Monitoring Pengembangan Karir PNS Dilingkungan Pemprov. Sumbar           | Provinsi Sumbar   | Laporan Pengembangan Karir PNS di Lingkungan Pemprov. Sumbar                        | 1 Dokumen                             | 72,395,164               | Monitoring Pengembangan Karir PNS Dilingkungan Pemprov. Sumbar           | Provinsi Sumbar   | Laporan Pengembangan Karir PNS di Lingkungan Pemprov. Sumbar                        | 1 Dokumen                             | 72,395,164     |
| 4   | Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar                       | Provinsi Sumbar   | Jumlah Peserta Rakornis                                                             | 69 Orang                              | 107,550,500              | Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar                       | Provinsi Sumbar   | Jumlah Peserta Rakornis                                                             | 69 Orang                              | 107,550,500    |
| 5   | Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja       | Provinsi Sumbar   | Tersedianya data Tentang Tenaga PPPK                                                | 1 Dokumen                             | 73,747,900               | Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja       | Provinsi Sumbar   | Tersedianya data Tentang Tenaga PPPK                                                | 1 Dokumen                             | 73,747,900     |
| 6   | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                         | Provinsi Sumbar   | Jumlah PNS Setda yang dilayani                                                      | 520 Orang                             | 101,942,500              | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                         | Provinsi Sumbar   | Jumlah PNS Setda yang dilayani                                                      | 520 Orang                             | 101,942,500    |
|     |                                                                          |                   |                                                                                     |                                       |                          |                                                                          |                   |                                                                                     |                                       |                |
| X   | <b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>                             | Provinsi Sumbar   | Rata-Rata Indeks Survey Kepuasan Masyarakat                                         | 100%                                  | 426,507,971              | <b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>                             | Provinsi Sumbar   | Rata-Rata Indeks Survey Kepuasan Masyarakat                                         |                                       | 426,507,971    |
|     |                                                                          |                   | Persentase Kepatuhan Seluruh SKPD Provinsi Terhadap Pelaksanaan UU Pelayanan Publik |                                       |                          |                                                                          |                   | Persentase Kepatuhan Seluruh SKPD Provinsi Terhadap Pelaksanaan UU Pelayanan Publik |                                       |                |
| 1   | Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota | Provinsi Sumbar   | Jumlah UKPP yang dibina                                                             | 8 UKPP                                | 81,617,850               | Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota | Provinsi Sumbar   | Jumlah UKPP yang dibina                                                             | 8 UKPP                                | 81,617,850     |
| 2   | Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik                    | Provinsi Sumbar   | Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Provinsi Sumbar                                 | 2 Laporan                             | 76,870,560               | Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik                    | Provinsi Sumbar   | Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Provinsi Sumbar                                 | 2 Laporan                             | 76,870,560     |
| 3   | Pembinaan OPD Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                  | Kab/Kota Provinsi | Jumlah Peserta                                                                      | 80 Orang                              | 103,310,161              | Pembinaan OPD Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                  | Kab/Kota Provinsi | Jumlah Peserta                                                                      | 80 Orang                              | 103,310,161    |
| 4   | Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota           | Provinsi          | Jumlah Peserta Rakornis Pelayanan Publik                                            | 60 Orang                              | 164,709,400              | Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota           | Provinsi          | Jumlah Peserta Rakornis Pelayanan Publik                                            | 60 Orang                              | 164,709,400    |

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan Biro Organisasi pada dasarnya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016 – 2021. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu strategis. Penelaahan usulan program yang dikaitkan dengan kegiatan masyarakat salah satunya adalah yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan publik terutama dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat baik melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun melalui aplikasi pengelola pengaduan pelayanan publik yang diterapkan secara nasional yaitu Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik berbasis LAPOR-SP4N dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.32.

**TABEL T-C.32.**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                          | LOKASI                 | INDIKATOR KINERJA                                                          | BESARAN / VOLUME     |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                      | 4                                                                          | 5                    |
|          |                                                             |                        |                                                                            | <b>5,025,000,002</b> |
| <b>A</b> | <b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                   | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                       | <b>591,049,117</b>   |
| 1        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Provinsi Sumbar        | Tersedianya Sarana Surat Menyurat dan Honorarium Tenaga Administrasi       | 66,938,868           |
| 2        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Provinsi Sumbar        | Kebutuhan Listrik Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi                | 4,200,000            |
| 3        | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                | Provinsi Sumbar        | Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor                                   | 31,998,920           |
| 4        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Provinsi Sumbar        | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang Operasional Kantor | 39,488,129           |
| 5        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Provinsi Sumbar        | Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang diikuti                 | 435,423,200          |
| 6        | Penyediaan Makanan dan Minuman                              | Provinsi Sumbar        | Pertemuan / Rapat yang diselenggarakan                                     | 13,000,000           |
|          |                                                             |                        |                                                                            |                      |
| <b>B</b> | <b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>            | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>               | <b>193,768,850</b>   |
|          |                                                             |                        | <b>Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona Hijau)</b>   |                      |
| 1        | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi               | Provinsi Sumbar        | Jumlah Komputer PC/Desktop dan Printer yang diadakan                       | 39,000,000           |
| 2        | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional                      | Provinsi Sumbar        | Tersedianya Kendaraan Roda 2                                               | 25,000,000           |
| 3        | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Provinsi Sumbar        | Jumlah TV dan Dispenser yang diadakan                                      | 6,500,000            |
| 4        | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional    | Provinsi Sumbar        | Kendaraan Operasional / Dinas yang terpelihara                             | 106,818,850          |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                            | LOKASI                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                    | BESARAN / VOLUME   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                             | 3                      | 4                                                                                                                                                    | 5                  |
| 5        | Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor                                   | Provinsi Sumbar        | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor AC Split dan Mesin Ketik yang dipelihara                                                                    | 8,200,000          |
| 6        | Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi                               | Provinsi Sumbar        | Komputer PC, Desktop,Laptop/Notebook dan Printer dipelihara                                                                                          | 8,250,000          |
|          |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                    |
| <b>C</b> | <b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                             | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Rata-Rata Lamanya PNS mengikuti diklat</b>                                                                                                        | <b>57,411,347</b>  |
| 1        | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                    | Provinsi Sumbar        | PNS yang mengikuti Bimtek                                                                                                                            | 57,411,347         |
|          |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                    |
| <b>D</b> | <b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>                     | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD</b>                                                                           | <b>220,831,538</b> |
|          |                                                                                               |                        | <b>Nilai evaluasi SAKIP SKPD</b>                                                                                                                     |                    |
|          |                                                                                               |                        | <b>Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan</b>                                                                          |                    |
| 1        | Penatausahaan Keuangan SKPD                                                                   | Provinsi Sumbar        | Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA, PPTK, Bendahara, Operator SIPKD dan PTT                                                                     | 114,343,496        |
| 2        | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        | Provinsi Sumbar        | Jumlah Dokumen LAKIP OPD, LKPJ OPD, LPPD OPD, LAP KEU BIRO, Lap. Realisasi Anggaran ,Rentsra,Renja,Penetapan Kinerja Biro, Laporan Aset yang disusun | 79,897,000         |
| 3        | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD                                            | Provinsi Sumbar        | Honorarium Pengelola Aset Daerah                                                                                                                     | 26,591,042         |
|          |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                    |
| <b>E</b> | <b>PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT</b> | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (skor hasil evaluasi AKIP)</b>                                                                                 | <b>467,643,257</b> |
|          |                                                                                               |                        | <b>Persentase SKPD Yang Telah Mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi AKIP &gt;=70</b>                                                                      |                    |
| 1        | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                                 | Pemprov                | Jumlah Laporan Kinerja yang disusun                                                                                                                  | 174,438,757        |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                | LOKASI          | INDIKATOR KINERJA                                                    | BESARAN / VOLUME     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3               | 4                                                                    | 5                    |
| 2        | Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar   | Pemprov         | Jumlah OPD yang di Monev pencapaian target Perjanjian Kinerja        | 41,645,200           |
| 3        | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat | Provinsi        | Jumlah Dokumen perjanjian Kinerja yang disusun                       | 92,330,900           |
| 4        | Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se- Sumatera Barat             | Provinsi        | Jumlah Peserta Bimtek                                                | 159,228,400          |
|          |                                                                                   |                 |                                                                      |                      |
| <b>F</b> | <b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                                                        | <b>Provinsi</b> | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                                    | <b>388,050,267</b>   |
| 1        | Sosialisasi Reformasi Birokrasi                                                   | Provinsi        | Jumlah Peserta Sosialisasi                                           | 139,437,667          |
| 2        | Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov. Sumbar          | Provinsi        | Jumlah Peserta Coaching                                              | 248,612,600          |
|          |                                                                                   |                 |                                                                      |                      |
| <b>G</b> | <b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH</b>                              | <b>Provinsi</b> | <b>Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan</b>         | <b>1,485,824,717</b> |
|          |                                                                                   |                 | <b>Persentase Penurunan Rician Tupoksi Yang Tumpang Tindih</b>       |                      |
| 1        | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat       | Provinsi        | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah | 381,513,834          |
| 2        | Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sumatera Barat            | Provinsi        | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Tupoksi Perangkat Daerah     | 150,734,133          |
| 3        | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                      | Provinsi        | Laporan Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi                          | 207,999,900          |
| 4        | Rakornis Kelembagaan Kab/kota se- Sumatera Barat                                  | Provinsi        | Jumlah Peserta Rakornis                                              | 111,375,150          |
| 5        | Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                     | Provinsi        | Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                | 118,000,000          |
| 6        | Bimbingan Teknis Penataan Jabatan                                                 | Provinsi        | Jumlah Peserta Bimtek Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah | 116,201,500          |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                            | LOKASI          | INDIKATOR KINERJA                                                                          | BESARAN / VOLUME   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                             | 3               | 4                                                                                          | 5                  |
| 7        | Penataan Jabatan Perangkat Daerah                                                             | Provinsi        | Tersusunnya Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan pada Kab/Kota | 400,000,200        |
|          |                                                                                               |                 |                                                                                            |                    |
| <b>H</b> | <b>PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                             | <b>Provinsi</b> | <b>Persentase SKPD yang telah menerapkan SOP secara baik</b>                               | <b>678,190,974</b> |
| 1        | Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota                                               | Provinsi        | Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan                                                       | 61,134,224         |
| 2        | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi | Provinsi        | Jumlah Peserta yang mengikuti Forkompanda                                                  | 86,607,500         |
| 3        | Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota                                     | Provinsi        | Jumlah SOP yang tersusun                                                                   | 157,101,300        |
| 4        | Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik                                        | Provinsi Sumbar | Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai                                                  | 373,347,950        |
|          |                                                                                               |                 |                                                                                            |                    |
| <b>I</b> | <b>PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>                                                     | <b>Provinsi</b> | <b>Persentase Kesesuaian Akurasi Data PNS Setda Dan Pemprov Sumbar</b>                     | <b>515,721,964</b> |
|          |                                                                                               |                 | <b>Persentase PNS Yang Dikembangkan Karirnya Dilingkungan Pemprov Sumbar</b>               |                    |
| 1        | Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar                                                      | Provinsi Sumbar | Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov Sumbar                                     | 91,385,300         |
| 2        | Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda                                 | Provinsi Sumbar | Jumlah Laporan Data Kepegawaian                                                            | 68,700,600         |
| 3        | Monitoring Pengembangan Karir PNS Dilingkungan Pemprov. Sumbar                                | Provinsi Sumbar | Laporan Pengembangan Karir PNS di Lingkungan Pemprov. Sumbar                               | 72,395,164         |
| 4        | Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar                                            | Provinsi Sumbar | Jumlah Peserta Rakornis                                                                    | 107,550,500        |
| 5        | Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja                            | Provinsi Sumbar | Tersedianya data Tentang Tenaga PPPK                                                       | 73,747,900         |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                                       | LOKASI            | INDIKATOR KINERJA                                                                          | BESARAN / VOLUME   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                        | 3                 | 4                                                                                          | 5                  |
| 6        | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                         | Provinsi Sumbar   | Jumlah PNS Setda yang dilayani                                                             | 101,942,500        |
|          |                                                                          |                   |                                                                                            |                    |
| <b>J</b> | <b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>                             | <b>Provinsi</b>   | <b>Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (74 unit kerja pelayanan publik)</b>       | <b>426,507,971</b> |
|          |                                                                          |                   | <b>Persentase Kepatuhan seluruh SKPD Provinsi terhadap Pelaksanaan UU Pelayanan Publik</b> |                    |
| 1        | Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota | Kab/Kota Provinsi | Jumlah UKPP yang dibina                                                                    | 81,617,850         |
| 2        | Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik                    | Provinsi Sumbar   | Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Provinsi Sumbar                                        | 76,870,560         |
| 3        | Pembinaan OPD Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                  | Provinsi Sumbar   | Jumlah Peserta                                                                             | 103,310,161        |
| 4        | Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota           | Provinsi Sumbar   | Jumlah Peserta Rakornis Pelayanan Publik                                                   | 164,709,400        |

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Sesuai dengan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 salah satunya Misi ke dua yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional diwujudkan dengan melaksanakan dengan perbaikan tata kelola pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah Daerah yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan dan perubahan pola pikir.

Berdasarkan kepada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diseleraskan dengan agenda pembangunan nasional yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan serta penyempurnaan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara nasional dilaksanakan dengan :

1. Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, dengan memantapkan implementasi SAKIP.
2. Penerapan *e-government* .
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan.
4. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.
5. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan kepada arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021,

dengan harapan dapat mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Penataan kelembagaan yang dapat mewujudkan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga tidak ada tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih pada masing – masing OPD.
- b. Penataan ketatalaksanaan pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan review/menyusun SOP sesuai kelembagaan OPD berdasarkan peta SOP yang telah ditetapkan.
- c. Penataan sistem manajemen dan pelaporan kinerja.
- d. Penataan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada arah kebijakan yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan.
2. Meningkatkan komitmen SDM Aparatur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Melaksanakan perubahan pola pikir SDM aparatur menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
4. Penyederhanaan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah serta menghilangkan tumpang tindih fungsi antar OPD.
5. Penyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik terutama yang menyangkut pelayanan perizinan dan pelayanan dasar.
6. Melaksanakan review terhadap sejumlah proses pelayanan publik.
7. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal diatas jelas terlihat bahwa penerapan arah kebijakan telah selaras dengan kebijakan nasional, namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan terutama pada tingkat implementasinya di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.2.1. Tujuan**

- a) Terwujudnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b) Mewujudkan penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- c) Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui inovasi pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- d) Terwujudnya peningkatan tata kelola organisasi.
- e) Terciptanya prosedur dan tata kerja yang efektif dan Efisien dalam Sistem Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- f) Terlaksananya Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi.
- g) Terwujudnya Peningkatan pelayanan aparatur Sekretariat Daerah.

#### **3.2.2. Sasaran**

- a) Meningkatnya penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b) Meningkatnya kualitas Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi, ukuran dan sinergis.
- c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi.
- d) Meningkatnya pengelolaan tata kelola organisasi dilingkungan Biro Organisasi

- e) Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan atau bisnis proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Provinsi Sumatera Barat.
- f) Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- g) Meningkatnya pelayanan terhadap aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan**

Untuk penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2020, disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan Biro Organisasi Tahun 2016 - 2021 serta misi ke-2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan Biro Organisasi.

#### **b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

1. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 adalah sebanyak 10 program dengan 43 kegiatan.
  2. Lokasi program pada umumnya dilaksanakan di Provinsi dan ada beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan ke Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
  3. Anggaran yang dibutuhkan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  4. Total Kebutuhan dana Rp 5.025.000.002,-
- Rincian Program/kegiatan tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.33. berikut ini.

**TABEL T-C.33.**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ORGANISASI TAHUN 2020**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 PROVINSI SUMATERA BARAT**

| KODE |    |    |    | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN                          | RENCANA TAHUN 2020                                                         |                        |                                               |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                             | LOKASI                                                                     | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF                 | SUMBER DANA |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                                                             | 6                                                           | 7                                                                          | 8                      | 9                                             | 10          | 11              | 12                                | 13                            |
|      |    |    |    |                                                               |                                                             |                                                                            |                        |                                               |             |                 |                                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH                                 |                                                                            |                        | 5,025,000,002                                 |             |                 |                                   | 5,701,675,000                 |
| 1    | 20 | 03 | 01 |                                                               | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                          | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Provinsi               |                                               | 591,049,117 | APBD            | -                                 | 856,800,000                   |
|      |    |    |    | 1                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Tersedianya Sarana Surat Menyurat dan Honorarium Tenaga Administrasi       | Provinsi               | 12 Bulan                                      | 66,938,868  | APBD            |                                   | 40,000,000                    |
|      |    |    |    | 2                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Kebutuhan Listrik Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi                | Provinsi               | 12 Bulan                                      | 4,200,000   | APBD            | 12 Bulan                          | 4,200,000                     |
|      |    |    |    | 3                                                             | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                | Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kator                                    | Provinsi               | 12 Bulan                                      | 31,998,920  | APBD            | 12 Bulan                          | 45,000,000                    |
|      |    |    |    | 4                                                             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang Operasional Kantor | Provinsi               | 12 Bulan                                      | 39,488,129  | APBD            | 12 Bulan                          | 55,000,000                    |
|      |    |    |    | 5                                                             | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang diikuti                 | Provinsi               | 12 Bulan                                      | 435,423,200 | APBD            | 12 Bulan                          | 700,000,000                   |
|      |    |    |    | 6                                                             | Penyediaan Makanan dan Minuman                              | Pertemuan / Rapat yang diselenggarakan                                     | Provinsi               | 12 Bulan                                      | 13,000,000  | APBD            | 12 Bulan                          | 12,600,000                    |
| 1    | 20 | 03 | 02 |                                                               | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                   | Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur                      | Provinsi               | 10%                                           | 193,768,850 | APBD            | -                                 | 281,000,000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                             | Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona Hijau)          |                        |                                               |             |                 |                                   |                               |
|      |    |    |    | 1                                                             | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi               | Jumlah Komputer PC/Desktop dan Printer yang diadakan                       | Provinsi               | 2 Unit Komputer PC/Desktop dan 3 Unit Printer | 39,000,000  | APBD            |                                   |                               |

| KODE |    |    |    | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN                                 | RENCANA TAHUN 2020                                                                |                        |                                                                        |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 |                                                                             |             |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                    | LOKASI                                                                            | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF                                          | SUMBER DANA |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF                                               |             |
|      |    |    |    | 2                                                             | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional                             | Tersedianya Kendaraan Roda 2                                                      | Provinsi               | 1 Unit Roda 2                                                          | 25,000,000  | APBD            |                                   |                                                                             |             |
|      |    |    |    | 3                                                             | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah TV dan Dispenser yang diadakan                                             | Provinsi               | 1 Unit TV dan 1 Unit Dispenser                                         | 6,500,000   | APBD            |                                   |                                                                             |             |
|      |    |    |    | 4                                                             | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional           | Kendaraan Operasional / Dinas yang terpelihara                                    | Provinsi               | 4 Unit Roda 4 dan 1 Unit Roda 2                                        | 106,818,850 | APBD            |                                   | 100%                                                                        | 85,000,000  |
|      |    |    |    | 5                                                             | Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor        | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor AC Split dan Mesin Ketik yang dipelihara | Provinsi               | 10 Unit AC Split dan 3 Unit Mesin Ketik                                | 8,200,000   | APBD            |                                   | 5 Unit AC, dan 3 Unit Mesin Tik                                             | 10,000,000  |
|      |    |    |    | 6                                                             | Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi    | Komputer PC, Desktop,Laptop/Notebook dan Printer dipelihara                       | Provinsi               | 5 Unit Komputer PC/Desktop ,5 Unit Laptop /Notebook dan 5 Unit Printer | 8,250,000   | APBD            |                                   | 15 Unit Komputer PC, 10 Unit Notebook, 10 Unit Printer, 1 Camdig, 2 Infocus | 26,000,000  |
|      |    |    |    | 7                                                             | Pengadaan Meubeleur                                                | Perlengkapan Kantor dan Mobilier yang diadakan                                    | Provinsi               |                                                                        |             |                 |                                   | 10 Unit Meja dan Kursi Kerja Staf                                           | 160,000,000 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                    |                                                                                   |                        |                                                                        |             |                 |                                   |                                                                             |             |
| 1    | 20 | 03 | 05 |                                                               | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                         | Rata-Rata Lamanya PNS mengikuti diklat                                            | Provinsi               | 20%                                                                    | 57,411,347  | APBD            | -                                 | 20%                                                                         | 70,000,000  |
|      |    |    |    | 1                                                             | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         | PNS yang mengikuti Bimtek                                                         | Provinsi               | 17 Orang PNS                                                           | 57,411,347  | APBD            |                                   | 12 Orang                                                                    | 70,000,000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                    |                                                                                   |                        |                                                                        |             |                 |                                   |                                                                             |             |
| 1    | 20 | 03 | 06 |                                                               | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD               | Provinsi               | 90%                                                                    | 220,831,538 | APBD            | -                                 | 90%                                                                         | 204,000,000 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                    | Nilai evaluasi SAKIP SKPD                                                         |                        |                                                                        |             |                 |                                   |                                                                             |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                    | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan              |                        |                                                                        |             |                 |                                   |                                                                             |             |
|      |    |    |    | 1                                                             | Penatausahaan Keuangan SKPD                                        | Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA, PPTK, Bendahara, Operator SIPKD dan PTT  | Provinsi               | 12 Bulan                                                               | 114,343,496 | APBD            |                                   | 12 Bulan                                                                    | 125,000,000 |

| KODE |    |    |    |   | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN                     | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                   | RENCANA TAHUN 2020 |                                                                                                                         |                               |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 |                               |
|------|----|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |   |                                                                                   |                                                                                                                                                      | LOKASI             | TARGET CAPAIAN KINERJA                                                                                                  | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|      |    |    |    | 2 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | Jumlah Dokumen LAKIP OPD, LKPJ OPD, LPPD OPD, LAP KEU BIRO, Lap. Realisasi Anggaran ,Rentsra,Renja,Penetapan Kinerja Biro, Laporan Aset yang disusun | Provinsi           | 10 Dokumen (LAKIP,LKPJ, LPPD,LAP KEU BIRO, Lap Realisasi Anggaran, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja biro ,Laporan Aset | 79,897,000                    | APBD        |                 | 10 Dokumen                        | 59,000,000                    |
|      |    |    |    |   | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD                                | Honorarium Pengelola Aset Daerah                                                                                                                     | Provinsi           | 12 Bulan                                                                                                                | 26,591,042                    | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 20,000,000                    |
|      |    |    |    |   |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                         |                               |             |                 |                                   |                               |
| 1    | 20 | 03 | 19 |   | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Provinsi Sumbar    | Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (skor hasil evaluasi AKIP)                                                                                        | Provinsi           | BB                                                                                                                      | 467,643,257                   | APBD        |                 | BB                                | 597,000,000                   |
|      |    |    |    |   |                                                                                   | Persentase SKPD Yang Telah Mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi AKIP >=70                                                                                | Provinsi           |                                                                                                                         |                               | APBD        |                 |                                   |                               |
|      |    |    |    | 1 | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                     | Jumlah Laporan Kinerja yang disusun                                                                                                                  | Provinsi           | 1 Dokumen /55 Eksemplar                                                                                                 | 174,438,757                   | APBD        |                 | 1 Dokumen /60 Eksemplar           | 250,000,000                   |
|      |    |    |    | 2 | Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar   | Jumlah OPD yang di Monev pencapaian target Perjanjian Kinerja                                                                                        | Provinsi           | 50 OPD                                                                                                                  | 41,645,200                    | APBD        |                 | 50 OPD                            | 47,000,000                    |
|      |    |    |    | 3 | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat | Jumlah Dokumen perjanjian Kinerja yang disusun                                                                                                       | Provinsi           | 1 Dokumen /55 Eksemplar                                                                                                 | 92,330,900                    | APBD        |                 | 1 Dokumen /60 Eksemplar           | 93,000,000                    |
|      |    |    |    | 4 | Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se- Sumatera Barat             | Jumlah Peserta Bimtek                                                                                                                                | Provinsi           | 110 Orang                                                                                                               | 159,228,400                   | APBD        |                 | 150 Orang                         | 207,000,000                   |
|      |    |    |    |   |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                         |                               |             |                 |                                   |                               |
| 1    | 20 | 03 | 20 |   | MANAJEMEN PERUBAHAN                                                               | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                           | Provinsi           | 100%                                                                                                                    | 388,050,267                   | APBD        |                 |                                   | 385,000,000                   |
|      |    |    |    | 1 | Sosialisasi Reformasi Birokrasi                                                   | Jumlah Peserta Sosialisasi                                                                                                                           | Provinsi           | 125 Orang                                                                                                               | 139,437,667                   | APBD        |                 | 138 Orang                         | 135,000,000                   |
|      |    |    |    | 2 | Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov. Sumbar          | Jumlah Peserta Coaching                                                                                                                              | Provinsi           | 150 Orang                                                                                                               | 248,612,600                   | APBD        |                 | 100%                              | 250,000,000                   |

| KODE |    |    |    |   | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN               | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN                                   | RENCANA TAHUN 2020                                                   |                        |                               |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 |                               |
|------|----|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |   |                                                                             |                                                                      | LOKASI                                                               | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1    | 20 | 03 | 27 |   | PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH                               | Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan                | Provinsi                                                             | 75%                    | 1,485,824,717                 | APBD        |                 | 90%                               | 1,511,875,000                 |
|      |    |    |    |   |                                                                             | Persentase Penurunan Rician Tupoksi Yang Tumpang Tindih              |                                                                      |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
|      |    |    |    | 1 | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah | 1 Ranperda/Ranpergub   | 381,513,834                   | APBD        |                 | 100%                              | 210,000,000                   |
|      |    |    |    | 2 | Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sumatera Barat      | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Tupoksi Perangkat Daerah     | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Tupoksi Perangkat Daerah     | 10 Ranpergub           | 150,734,133                   | APBD        |                 | 100%                              | 290,000,000                   |
|      |    |    |    | 3 | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                | Laporan Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi                          | Laporan Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi                          | 1 Dokumen              | 207,999,900                   | APBD        |                 | 10 Kab/Kota                       | 200,000,000                   |
|      |    |    |    | 4 | Rakornis Kelembagaan Kab/kota se- Sumatera Barat                            | Jumlah Peserta Rakornis                                              | Jumlah Peserta Rakornis                                              | 38 Orang               | 111,375,150                   | APBD        |                 | 38 Orang                          | 211,875,000                   |
|      |    |    |    | 5 | Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota               | Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                | Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                | 1 Dokumen              | 118,000,000                   | APBD        |                 | 1 Dokumen                         | 130,000,000                   |
|      |    |    |    | 6 | Bimbingan Teknis Penataan Jabatan                                           | Jumlah Peserta Bimtek Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah | Jumlah Peserta Bimtek Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah | 55 Orang               | 116,201,500                   | APBD        |                 | 50 Peserta                        | 170,000,000                   |

| KODE |    |    |    | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN                                                            | RENCANA TAHUN 2020                                                                         |                                                                                            |                                       |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 |                                                      |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                               | LOKASI                                                                                     | TARGET CAPAIAN KINERJA                                                                     | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF         | SUMBER DANA |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF                        |
|      |    |    |    | 7                                                             | Penataan Jabatan Perangkat Daerah                                                             | Tersusunnya Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan pada Kab/Kota | Tersusunnya Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan pada Kab/Kota | 1 Ranpergub dan 19 Kab/Kota           | 400,000,200 | APBD            |                                   | 22 OPD<br>300,000,000                                |
| 1    | 20 | 03 | 27 |                                                               | <b>PENGUATAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                            | <b>Persentase SKPD Yang Menerapkan SOP Secara Baik</b>                                     | Provinsi                                                                                   |                                       | 678,190,974 | APBD            |                                   | 100%<br>705,000,000                                  |
|      |    |    |    | 1                                                             | Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota                                               | Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan                                                       | Provinsi                                                                                   | 4 Kab/Kota                            | 61,134,224  | APBD            |                                   | 4 Kab/Kota<br>105,000,000                            |
|      |    |    |    | 2                                                             | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi | Jumlah Peserta yang mengikuti Forkompanda                                                  | Provinsi                                                                                   | 40 Orang                              | 86,607,500  | APBD            |                                   | 60 Orang<br>150,000,000                              |
|      |    |    |    | 3                                                             | Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota                                     | Jumlah SOP yang tersusun                                                                   | Provinsi                                                                                   | 6 SOP OPD                             | 157,101,300 | APBD            |                                   | 15 OPD<br>200,000,000                                |
|      |    |    |    | 4                                                             | Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik                                        | Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai                                                  | Provinsi                                                                                   | 10 UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota | 373,347,950 | APBD            |                                   | 10 UKPP Provinsi dan 10 UKPP Kab/Kota<br>250,000,000 |
| 1    | 20 | 03 | 21 |                                                               | <b>PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>                                                     | <b>Laporan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>                                          | Provinsi                                                                                   | 100%                                  | 515,721,964 | APBD            |                                   | 100%<br>521,000,000                                  |
|      |    |    |    | 1                                                             | Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov Sumbar                                     | Provinsi                                                                                   | 2 Dokumen                             | 91,385,300  | APBD            |                                   | 1 Dokumen<br>85,000,000                              |
|      |    |    |    | 2                                                             | Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda                                 | Jumlah Laporan Data Kepegawaian                                                            | Provinsi                                                                                   | 10 Dokumen                            | 68,700,600  | APBD            |                                   | 4 Dokumen<br>70,000,000                              |
|      |    |    |    | 3                                                             | Monitoring Pengembangan Karir PNS Dilingkungan Pemprov. Sumbar                                | Laporan Pengembangan Karir PNS di Lingkungan Pemprov. Sumbar                               | Provinsi                                                                                   | 1 Dokumen                             | 72,395,164  | APBD            |                                   | 1 Dokumen<br>30,000,000                              |
|      |    |    |    | 4                                                             | Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar                                            | Jumlah Peserta Rakornis                                                                    | Provinsi                                                                                   | 69 Orang                              | 107,550,500 | APBD            |                                   | 100%<br>199,000,000                                  |

| KODE |    |    |    |   | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN                                                  | RENCANA TAHUN 2020 |                        |                               |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 |                               |
|------|----|----|----|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |   |                                                                          |                                                                                     | LOKASI             | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|      |    |    |    | 5 | Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja       | Tersedianya data Tentang Tenaga PPPK                                                | Provinsi           | 1 Dokumen              | 73,747,900                    | APBD        |                 | 100%                              | 60,000,000                    |
|      |    |    |    | 6 | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                         | Jumlah PNS Setda yang dilayani                                                      | Provinsi           | 520 Orang              | 101,942,500                   | APBD        |                 | 550 Orang                         | 77,000,000                    |
|      |    |    |    |   |                                                                          |                                                                                     |                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
| 1    | 20 | 03 | 22 |   | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                                    | Rata-Rata Indeks Survey Kepuasan Masyarakat                                         | Provinsi           | 100%                   | 426,507,971                   | APBD        |                 |                                   | 570,000,000                   |
|      |    |    |    |   |                                                                          | Persentase Kepatuhan Seluruh SKPD Provinsi Terhadap Pelaksanaan UU Pelayanan Publik |                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
|      |    |    |    | 1 | Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota | Jumlah UKPP yang dibina                                                             | Provinsi           | 8 UKPP                 | 81,617,850                    | APBD        |                 | 6 unit pelayan publik             | 110,000,000                   |
|      |    |    |    | 2 | Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik                    | Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Provinsi Sumbar                                 | Provinsi           | 2 Laporan              | 76,870,560                    | APBD        |                 | 2 Laporan                         | 170,000,000                   |
|      |    |    |    | 3 | Pembinaan OPD Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                  | Jumlah Peserta                                                                      | Provinsi           | 80 Orang               | 103,310,161                   | APBD        |                 | 100 Orang                         | 150,000,000                   |
|      |    |    |    | 4 | Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota           | Jumlah Peserta Rakornis Pelayanan Publik                                            | Provinsi           | 60 Orang               | 164,709,400                   | APBD        |                 | 100%                              | 140,000,000                   |

## B A B IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Biro Organisasi Tahun 2020 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2020. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2020 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian misi 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rangka menunjang pencapaian misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

Berdasarkan faktor-faktor diatas perumusan/perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

6. Penyediaan Makanan dan Minuman.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan kantor
6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Komputer dan Jaringan Komputerisasi

## **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.**

1. Penatausahaan Keuangan SKPD
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

## **5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat**

1. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat
4. Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat

**6. Program Manajemen Perubahan**

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi
2. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Sumbar

**7. Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sumatera Barat.
3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
4. Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat.
5. Monitoring Dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
6. Bimbingan Teknis Penataan Jabatan
7. Penataan Jabatan Perangkat Daerah

**8. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.**

1. Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota.
2. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi.
3. Penyusunan Dan Evaluasi SOP pada Pemerintah Prov. dan Kab/Kota.
4. Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik

**9. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**

1. Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar
2. Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda
3. Monitoring Pengembangan Karir PNS Dilingkungan Pemprov. Sumbar
4. Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar
5. Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
6. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

**10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

1. Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota
2. Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
3. Pembinaan OPD Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi Dan Kabupaten / Kota.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan/direncanakan untuk tahun anggaran 2020 terdiri dari 10 Program dengan 43 kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.025.000.002,- untuk lebih jelasnya rincian rencana kerja Biro Organisasi tahun 2020 serta besaran pendanaannya dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini :

**PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ORGANISASI TAHUN 2020**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                          | LOKASI                 | INDIKATOR KINERJA                                                          | BESARAN / VOLUME     |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                      | 4                                                                          | 5                    |
|          |                                                             |                        |                                                                            | <b>5,025,000,002</b> |
| <b>A</b> | <b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                   | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                       | <b>591,049,117</b>   |
| 1        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Provinsi Sumbar        | Tersedianya Sarana Surat Menyurat dan Honorarium Tenaga Administrasi       | 66,938,868           |
| 2        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Provinsi Sumbar        | Kebutuhan Listrik Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi                | 4,200,000            |
| 3        | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                | Provinsi Sumbar        | Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor                                   | 31,998,920           |
| 4        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Provinsi Sumbar        | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang Operasional Kantor | 39,488,129           |
| 5        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Provinsi Sumbar        | Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang diikuti                 | 435,423,200          |
| 6        | Penyediaan Makanan dan Minuman                              | Provinsi Sumbar        | Pertemuan / Rapat yang diselenggarakan                                     | 13,000,000           |
|          |                                                             |                        |                                                                            |                      |
| <b>B</b> | <b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>            | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>               | <b>193,768,850</b>   |
|          |                                                             |                        | <b>Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona Hijau)</b>   |                      |
| 1        | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi               | Provinsi Sumbar        | Jumlah Komputer PC/Desktop dan Printer yang diadakan                       | 39,000,000           |
| 2        | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional                      | Provinsi Sumbar        | Tersedianya Kendaraan Roda 2                                               | 25,000,000           |
| 3        | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Provinsi Sumbar        | Jumlah TV dan Dispenser yang diadakan                                      | 6,500,000            |
| 4        | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional    | Provinsi Sumbar        | Kendaraan Operasional / Dinas yang terpelihara                             | 106,818,850          |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                            | LOKASI                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                    | BESARAN / VOLUME   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                             | 3                      | 4                                                                                                                                                    | 5                  |
| 5        | Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor                                   | Provinsi Sumbar        | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor AC Split dan Mesin Ketik yang dipelihara                                                                    | 8,200,000          |
| 6        | Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi                               | Provinsi Sumbar        | Komputer PC, Desktop,Laptop/Notebook dan Printer dipelihara                                                                                          | 8,250,000          |
|          |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                    |
| <b>C</b> | <b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                                             | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Rata-Rata Lamanya PNS mengikuti diklat</b>                                                                                                        | <b>57,411,347</b>  |
| 1        | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                    | Provinsi Sumbar        | PNS yang mengikuti Bimtek                                                                                                                            | 57,411,347         |
|          |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                    |
| <b>D</b> | <b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>                     | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD</b>                                                                           | <b>220,831,538</b> |
|          |                                                                                               |                        | <b>Nilai evaluasi SAKIP SKPD</b>                                                                                                                     |                    |
|          |                                                                                               |                        | <b>Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan</b>                                                                          |                    |
| 1        | Penatausahaan Keuangan SKPD                                                                   | Provinsi Sumbar        | Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA, PPTK, Bendahara, Operator SIPKD dan PTT                                                                     | 114,343,496        |
| 2        | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        | Provinsi Sumbar        | Jumlah Dokumen LAKIP OPD, LKPJ OPD, LPPD OPD, LAP KEU BIRO, Lap. Realisasi Anggaran ,Rentsra,Renja,Penetapan Kinerja Biro, Laporan Aset yang disusun | 79,897,000         |
| 3        | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD                                            | Provinsi Sumbar        | Honorarium Pengelola Aset Daerah                                                                                                                     | 26,591,042         |
|          |                                                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                    |
| <b>E</b> | <b>PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT</b> | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (skor hasil evaluasi AKIP)</b>                                                                                 | <b>467,643,257</b> |
|          |                                                                                               |                        | <b>Persentase SKPD Yang Telah Mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi AKIP &gt;=70</b>                                                                      |                    |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                | LOKASI          | INDIKATOR KINERJA                                                    | BESARAN / VOLUME     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3               | 4                                                                    | 5                    |
| 1        | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                     | Pemprov         | Jumlah Laporan Kinerja yang disusun                                  | 174,438,757          |
| 2        | Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar   | Pemprov         | Jumlah OPD yang di Monev pencapaian target Perjanjian Kinerja        | 41,645,200           |
| 3        | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat | Provinsi        | Jumlah Dokumen perjanjian Kinerja yang disusun                       | 92,330,900           |
| 4        | Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se- Sumatera Barat             | Provinsi        | Jumlah Peserta Bimtek                                                | 159,228,400          |
|          |                                                                                   |                 |                                                                      |                      |
| <b>F</b> | <b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                                                        | <b>Provinsi</b> | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                                    | <b>388,050,267</b>   |
| 1        | Sosialisasi Reformasi Birokrasi                                                   | Provinsi        | Jumlah Peserta Sosialisasi                                           | 139,437,667          |
| 2        | Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov. Sumbar          | Provinsi        | Jumlah Peserta Coaching                                              | 248,612,600          |
|          |                                                                                   |                 |                                                                      |                      |
| <b>G</b> | <b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH</b>                              | <b>Provinsi</b> | <b>Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan</b>         | <b>1,485,824,717</b> |
|          |                                                                                   |                 | <b>Persentase Penurunan Rician Tupoksi Yang Tumpang Tindih</b>       |                      |
| 1        | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat       | Provinsi        | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah | 381,513,834          |
| 2        | Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sumatera Barat            | Provinsi        | Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Tupoksi Perangkat Daerah     | 150,734,133          |
| 3        | Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                      | Provinsi        | Laporan Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi                          | 207,999,900          |
| 4        | Rakornis Kelembagaan Kab/kota se- Sumatera Barat                                  | Provinsi        | Jumlah Peserta Rakornis                                              | 111,375,150          |
| 5        | Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                     | Provinsi        | Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota                | 118,000,000          |
| 6        | Bimbingan Teknis Penataan Jabatan                                                 | Provinsi        | Jumlah Peserta Bimtek Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah | 116,201,500          |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                            | LOKASI          | INDIKATOR KINERJA                                                                          | BESARAN / VOLUME   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                             | 3               | 4                                                                                          | 5                  |
| 7        | Penataan Jabatan Perangkat Daerah                                                             | Provinsi        | Tersusunnya Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan pada Kab/Kota | 400,000,200        |
|          |                                                                                               |                 |                                                                                            |                    |
| <b>H</b> | <b>PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                             | <b>Provinsi</b> | <b>Persentase SKPD yang telah menerapkan SOP secara baik</b>                               | <b>678,190,974</b> |
| 1        | Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota                                               | Provinsi        | Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan                                                       | 61,134,224         |
| 2        | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi | Provinsi        | Jumlah Peserta yang mengikuti Forkompanda                                                  | 86,607,500         |
| 3        | Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota                                     | Provinsi        | Jumlah SOP yang tersusun                                                                   | 157,101,300        |
| 4        | Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik                                        | Provinsi Sumbar | Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai                                                  | 373,347,950        |
|          |                                                                                               |                 |                                                                                            |                    |
| <b>I</b> | <b>PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>                                                     | <b>Provinsi</b> | <b>Persentase Kesesuaian Akurasi Data PNS Setda Dan Pemprov Sumbar</b>                     | <b>515,721,964</b> |
|          |                                                                                               |                 | <b>Persentase PNS Yang Dikembangkan Karirnya Dilingkungan Pemprov Sumbar</b>               |                    |
| 1        | Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar                                                      | Provinsi Sumbar | Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov Sumbar                                     | 91,385,300         |
| 2        | Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda                                 | Provinsi Sumbar | Jumlah Laporan Data Kepegawaian                                                            | 68,700,600         |
| 3        | Monitoring Pengembangan Karir PNS Dilingkungan Pemprov. Sumbar                                | Provinsi Sumbar | Laporan Pengembangan Karir PNS di Lingkungan Pemprov. Sumbar                               | 72,395,164         |
| 4        | Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar                                            | Provinsi Sumbar | Jumlah Peserta Rakornis                                                                    | 107,550,500        |
| 5        | Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja                            | Provinsi Sumbar | Tersedianya data Tentang Tenaga PPPK                                                       | 73,747,900         |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN                                                       | LOKASI            | INDIKATOR KINERJA                                                                          | BESARAN / VOLUME   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                        | 3                 | 4                                                                                          | 5                  |
| 6        | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                         | Provinsi Sumbar   | Jumlah PNS Setda yang dilayani                                                             | 101,942,500        |
|          |                                                                          |                   |                                                                                            |                    |
| <b>J</b> | <b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>                             | <b>Provinsi</b>   | <b>Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (74 unit kerja pelayanan publik)</b>       | <b>426,507,971</b> |
|          |                                                                          |                   | <b>Persentase Kepatuhan seluruh SKPD Provinsi terhadap Pelaksanaan UU Pelayanan Publik</b> |                    |
| 1        | Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota | Kab/Kota Provinsi | Jumlah UKPP yang dibina                                                                    | 81,617,850         |
| 2        | Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik                    | Provinsi Sumbar   | Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Provinsi Sumbar                                        | 76,870,560         |
| 3        | Pembinaan OPD Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                  | Provinsi Sumbar   | Jumlah Peserta                                                                             | 103,310,161        |
| 4        | Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota           | Provinsi Sumbar   | Jumlah Peserta Rakornis Pelayanan Publik                                                   | 164,709,400        |

## B A B V

### P E N U T U P

Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2020 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia beserta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, perlu segera dilaksanakan:
  - a. Pengevaluasian perangkat daerah apakah perangkat daerah yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Penyusunan uraian tugas jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Hal ini penting untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, ukuran dan sinergi.
  - c. Review/penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD
2. Kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018 telah mendapat predikat **BB**. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang telah dicapai perlu secara konsisten dilakukan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari:
  - a. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat.
  - c. Monev capaian kinerja perjanjian kinerja Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- d. Bimbingan teknis sistem AKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun hasil yang dicapai belum dilakukan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilaksanakan suatu kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tahun 2020 serta pelaksanaan peningkatan kinerja UKPP dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai perwujudan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kompetensi penyelenggaraan pelayanan sesuai Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.
3. Manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik dan professional secara berkelanjutan. Sosialisasi tentang reformasi birokrasi merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan bagi seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai obyek dan subyek reformasi birokrasi itu sendiri, dan hal ini merupakan perkuatan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini diajukan untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Padang, Januari 2019

**KEPALA BIRO ORGANISASI**

**IRWAN, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680415 198902 1001